



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

NASKAH

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

**PROVINSI JAWA TENGAH
2024**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Naskah ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan dan pengembangan sektor kepemudaan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan sebagai instrumen pengukuran status pembangunan pemuda melalui pendekatan indeks komposit yang meliputi tiga pilar utama, yaitu pembangunan individu, penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga pilar ini saling terkait erat dan menjadi fondasi bagi pemuda dalam memainkan perannya sebagai agen pembangunan bangsa.

Berdasarkan hasil telaah secara mendalam terhadap perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, diketahui bahwa nilai IPP mencapai nilai sebesar 58,33. Peningkatan nilai ini tidak hanya mencerminkan adanya progres dan perbaikan yang signifikan, tetapi juga menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai IPP pada tahun 2022 berada pada nilai 53,83, kemudian meningkat menjadi 55,5 pada tahun 2023, hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan nilai tertinggi, yaitu 58,33. Tren kenaikan yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut ini menggambarkan kemajuan positif yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai aspek pembangunan pemuda, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga partisipasi aktif dalam masyarakat.

Dengan diperolehnya hasil perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang mencerminkan capaian pembangunan



pemuda dalam berbagai dimensi, diperlukan langkah koordinasi strategis lintas sektor yang lebih intensif dan terpadu. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pembangunan pemuda yang berkelanjutan dan inklusif. Koordinasi strategis ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Sebagai pelaksana utama kebijakan daerah, OPD perlu berkolaborasi erat untuk memastikan program-program pembangunan pemuda berjalan sinergis. Contohnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi pemuda, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mendukung pembukaan peluang ekonomi dan pelatihan keterampilan.
2. Institusi Vertikal
Integrasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah. Hal ini dapat membantu mengatasi kendala-kendala strategis yang memerlukan dukungan lebih luas dari pemerintah pusat.
3. Pihak Swasta
Keterlibatan sektor swasta sangat diperlukan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan pengembangan keterampilan bagi pemuda. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kemitraan strategis lainnya, sektor swasta dapat mendukung program pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan inovasi yang berfokus pada pemuda.
4. Institusi Akademis
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memainkan peran kunci dalam menyediakan data, analisis, dan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan pembangunan pemuda. Selain itu, institusi akademis juga dapat berperan dalam membangun kapasitas pemuda melalui pendidikan formal maupun pelatihan berbasis riset.



5. Media

Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, dan mengadvokasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan pemuda. Media juga dapat digunakan sebagai platform untuk mempromosikan program-program pemerintah, keberhasilan pemuda, dan pentingnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.

6. Komunitas dan Organisasi Pemuda

Partisipasi komunitas dan organisasi pemuda sangat dibutuhkan untuk memastikan suara pemuda terdengar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mereka juga dapat menjadi mitra penting dalam pelaksanaan program-program di tingkat lokal, sehingga program tersebut lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang erat di antara semua pihak ini, diharapkan upaya pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Sinergi ini akan memungkinkan terciptanya program-program yang berorientasi pada hasil serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup pemuda di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi sosial, dan kesetaraan gender.

Melalui dokumen ini, kami berharap dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai status pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan lima domain utama, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Naskah ini juga diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemerintah dalam memetakan isu strategis, mengidentifikasi potensi, serta mengevaluasi dampak berbagai inisiatif yang telah dilakukan dalam pembangunan pemuda.

Kami menyadari bahwa penyusunan naskah ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa data, masukan, maupun pandangan yang konstruktif dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga naskah ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, serta masyarakat luas dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Desember, 2024

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah



AGUNG HARIYADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197012021990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB – 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
1.2.1 Maksud	4
1.2.2 Tujuan	4
1.2.3 Sasaran.....	4
1.3 RUANG LINGKUP.....	5
1.3.1 Lingkup Spasial.....	5
1.3.2 Lingkup Substansi	5
1.4 DASAR HUKUM	5
1.5 SISTEMATIKA.....	6
BAB – 2 PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH .	8
2.1 KONSEP PEMUDA DAN PEMBANGUNAN.....	9
2.1.1 Pemuda	9
2.1.2 Pembangunan Pemuda.....	11
2.1.3 Pemuda dan Tantangan Masa Depan	12
2.1.4 Pengukuran Capaian Pembangunan Pemuda	13
2.1.5 Peran Pemuda dalam Pembangunan	17
2.1.6 Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan	18
2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH	21
2.2.1 Aspek Geografi.....	21
2.2.2 Aspek Demografi.....	24
2.2.3 Aspek Ekonomi.....	30
2.3 ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN JAWA TENGAH	33

BAB - 3 DINAMIKA CAPAIAN IPP PROVINSI JAWA TENGAH DAN METODOLOGI
..... **34**

3.1	CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH	35
3.1.1	Capaian Domain Pendidikan	36
3.1.2	Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan.....	37
3.1.3	Capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	40
3.1.4	Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	42
3.1.5	Capaian Domain Gender dan Diskriminasi	44
3.2	METODOLOGI	46
3.2.1	Metodologi Pendekatan.....	47
3.2.2	Kerangka Pikir	49
3.2.3	Metodologi Perhitungan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah	50
3.2.4	Inventarisasi Data	55
3.2.5	Analisis Data	60
3.2.6	Kesimpulan dan Rekomendasi	64

BAB - 4 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH 2024.....
..... **65**

4.1	DOMAIN PENDIDIKAN.....	66
4.1.1	Rata-rata Lama Sekolah Pemuda.....	67
4.1.2	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah	69
4.1.3	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	71
4.1.4	Capaian Nilai Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	72
4.2	DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN	74
4.2.1	Angka Kesakitan Pemuda.....	75
4.2.2	Persentase Pemuda Korban Kejahatan.....	77
4.2.3	Persentase Pemuda yang Merokok	79
4.2.4	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	81
4.2.5	Capaian Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	83
4.3	DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	85
4.3.1	Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih.....	87
4.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda.....	89
4.3.3	Capaian Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	91
4.4	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	93

4.4.1	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	94
4.4.2	Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi	96
4.4.3	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	98
4.4.4	Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	101
4.5	DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI	103
4.5.1	Angka Perkawinan Usia Anak	105
4.5.2	Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi	107
4.5.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal...	110
4.5.4	Capaian Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	112
4.6	INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024	114
4.7	CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.....	118
BAB - 5	PENUTUP	121
5.1	KESIMPULAN.....	122
5.2	REKOMENDASI	123
DAFTAR PUSTAKA.....		128



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Usia Pemuda Menurut Sejumlah Lembaga Institusi	10
Tabel 2.2 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	22
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 2023. 25	
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	28
Tabel 2.5 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2021- 2023.....	31
Tabel 2.6 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2021-2023.....	32
Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP	54
Tabel 3.2 Permohonan Data OPD Terkait	57
Tabel 3.3 Permohonan Data Terhadap Walidata (BPS)	59
Tabel 3.4 Nilai Transformasi Indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	62
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Nilai Transformasi Indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih.....	63
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Nilai Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2024	73
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah 2024.....	83
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2024.....	91
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah 2024.....	101
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah 2024.....	112
Tabel 4.6 Perhitungan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	115
Tabel 4.7 Checklist Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Perhitungan IPP	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	14
Gambar 2.2 Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP.....	16
Gambar 2.3 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan	19
Gambar 2.4 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	22
Gambar 2.5 Persentase Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	24
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023.....	26
Gambar 2.7 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023.....	27
Gambar 2.8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur	29
Gambar 2.9 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Provinsi Jawa Tengah.....	30
Gambar 3.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah.....	35
Gambar 3.2 Capaian Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023	37
Gambar 3.3 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023.....	39
Gambar 3.4 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	41
Gambar 3.5 Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	44
Gambar 3.6 Capaian Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	46
Gambar 3.7 Kerangka Pikir Kajian	50
Gambar 3.8 Alur Proses Perhitungan IPP	53
Gambar 3.9 Tahapan Proses Pemenuhan Data Perhitungan IPP	56
Gambar 3.10 Tahapan Survei Institusional OPD	57
Gambar 3.11 Tahapan Survei Institusional BPS Provinsi	59
Gambar 3.12 Alur Perhitungan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	61
Gambar 4.1 Capaian Rata – rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	68
Gambar 4.2 Capaian APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	70
Gambar 4.3 Capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024 ..	71
Gambar 4.4 Capaian Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	73

Gambar 4.5 Capaian Angka Kesakitan Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	76
Gambar 4.6 Capaian Persentase Pemuda Korban Kejahatan Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024.....	78
Gambar 4.7 Capaian Persentase Pemuda yang Merokok Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024.....	80
Gambar 4.8 Capaian Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024.....	82
Gambar 4.9 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	84
Gambar 4.10 Capaian Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024.....	88
Gambar 4.11 Capaian TPT Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	90
Gambar 4.12 Capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	92
Gambar 4.13 Capaian Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	95
Gambar 4.14 Capaian Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	97
Gambar 4.15 Capaian Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Rapat Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	99
Gambar 4.16 Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	102
Gambar 4.17 Capaian Angka Perkawinan Usia Anak Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	106
Gambar 4.18 Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024	109
Gambar 4.19 Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024.....	111
Gambar 4.20 Capaian Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	113
Gambar 4.21 Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah.....	116
Gambar 4.22 Distribusi Capaian Perdomain IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	117
Gambar 4.23 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Masing-Masing Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	120



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

BAB 1

PENDAHULUAN

**NASKAH
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
PROVINSI JAWA TENGAH 2024**



1.1 LATAR BELAKANG

Pemuda memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada terciptanya negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai penerus kepemimpinan bangsa, kualitas pemuda sangat menentukan masa depan Indonesia, termasuk dalam mengoptimalkan bonus demografi. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya beriman dan bertakwa, tetapi juga berakhlak mulia, kreatif, inovatif, mandiri, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan.

Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pemuda sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Pemuda diharapkan menjadi pendorong utama kemajuan bangsa, seiring dengan perannya sebagai generasi penerus. Mengingat pentingnya bonus demografi yang dimiliki Indonesia, pengembangan kualitas pemuda menjadi semakin mendesak agar mereka siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara yang berusia 16-30 tahun. Pada tahun 2024, pemuda mencakup mereka yang lahir antara tahun 1994 hingga 2008. Berdasarkan data Susenas 2023, jumlah pemuda di Indonesia mencapai sekitar 64,16 juta jiwa atau sekitar 23,18 persen dari total populasi. Jumlah yang signifikan ini dapat menjadi kekuatan besar bagi Indonesia apabila generasi muda dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menempatkan isu kepemudaan sebagai salah satu fokus utama dalam Pembangunan Nasional. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melalui perencanaan ini, pemerintah berupaya mengintegrasikan isu-isu strategis terkait kepemudaan ke dalam kebijakan nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan kompetitif di tingkat global.

Sebagai salah satu upaya dalam mendukung perwujudan pembangunan nasional melalui urusan kepemudaan, maka pengukuran status pembangunan



pemuda dengan menggunakan suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP diukur 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya.

Menindak lanjuti upaya pengukuran pembangunan pemuda ini, maka disusunlah Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024. Naskah ini merupakan suatu instrumen yang memuat status pembangunan pemuda di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada 5 domain pengungkit yaitu, (1) Pendidikan, (2) Kesehatan dan Kesejahteraan, (3) Lapangan dan Kesempatan Kerja, (4) Partisipasi dan Kepemimpinan, serta (5) Gender dan Diskriminasi. Kelima domain ini nantinya akan memberikan gambaran bidang mana membutuhkan dukungan lebih, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Penyusunan Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyusun ***Policy Paper*** untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan sebagai landasan dalam memetakan permasalahan, potensi dan isu strategis pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Tengah serta mengukur dampak dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan.

Disusunnya naskah ini sebagai ***Policy Paper*** juga memungkinkan adanya rumusan rencana aksi strategis berupa seknario rekomendasi dalam rangka peningkatan dan penguatan pembangunan pemuda di Jawa Tengah. Naskah ini diharapkan menjadi landasan bagi seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pembangunan pemuda dalam menetapkan prioritas pembangunan pemuda yang lebih berkelanjutan dan inklusif.



1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Ditinjau dari penjabaran latar belakang di atas, maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah terumuskannya Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 yang komprehensif akan 5 domain penyusun IPP Provinsi Jawa Tengah.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah memberikan analisis yang mendalam mengenai pembangunan pemuda yang didasarkan pada hasil perhitungan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang menjadi dokumen kebijakan *Policy Paper*. Selain itu mampu memberikan rekomendasi spesifik mengenai kebijakan yang sebaiknya diadopsi atau dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari diselenggarakannya kegiatan penyusunan Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai pembangunan kepemudaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian tahapan metodologi analisis antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis hasil pembangunan pemuda melalui 5 domain IPP yaitu:
 - a. Domain pendidikan
 - b. Domain kesehatan dan kesejahteraan
 - c. Domain kesempatan dan lapangan kerja
 - d. Domain kepemimpinan dan partisipasi, dan
 - e. Domain gender dan diskriminasi
2. Perumusan kebijakan pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Tengah
3. Menyusun *Policy Paper*: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah



1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Lingkup Spasial

Secara wilayah, ruang lingkup wilayah penyusunan dokumen ini adalah wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah

1.3.2 Lingkup Substansi

Adapun lingkup substansi pada penyusunan Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap hasil perhitungan 5 domain indeks pembangunan pemuda serta melakukan perhitungan nilai IPP Jawa Tengah 2024
2. Menyusun kebijakan dalam penguatan pembangunan pemuda Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk *Policy Paper*.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika pelaporan pada dokumen Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah 2024 adalah sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup pengantar laporan yang menjelaskan latar belakang pelaksanaan pekerjaan, maksud dan tujuan penyusunan pekerjaan, cakupan kegiatan, serta susunan pelaporan.

BAB 2 - KERANGKA TEORI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bagian ini berisi pemahaman terkait kepemudaan, keterlibatan pemuda dalam pembangunan, gambaran deskripsi indikator penyusun pembangunan pemuda, serta isu strategis kepemudaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu bagian ini juga berisi mengenai gambaran umum wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditinjau berdasarkan aspek geografis dan demografi.

BAB 3 - DINAMIKA CAPAIAN IPP 2023 DAN METODOLOGI

Bagian ini berisi mengenai gambaran kepemudaan serta capaian masing – masing domain IPP Provinsi Jawa Tengah pada tahun sebelumnya dan juga tahapan sekaligus metode pelaksanaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB 4 - CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH 2024

Bagian ini berisi mengenai hasil pengukuran indikator dan domain pengungkit IPP Provinsi Jawa Tengah 2024 beserta pembahasannya.

BAB 5 - PENUTUP

Bab ini menyajikan rumusan kesimpulan yang didasarkan pada hasil pembahasan serta memberikan usulan rekomendasi terkait penguatan pembangunan pemuda di Provinsi Jawa Tengah.





Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

BAB 2

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN DAN GAMBARAN UMUM WILAYAH

**NASKAH
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
PROVINSI JAWA TENGAH 2024**



2.1 KONSEP PEMUDA DAN PEMBANGUNAN

Pemuda merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembangunan, karena mereka memiliki energi, kreativitas, dan semangat perubahan yang dapat mendorong kemajuan suatu bangsa. Dalam konsep pembangunan, pemuda sering dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi dan solusi untuk tantangan yang dihadapi masyarakat. Peran pemuda tidak hanya terbatas pada penerapan ide-ide baru, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai sosial seperti solidaritas, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan pendidikan yang baik dan akses terhadap peluang, pemuda dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan yang melibatkan pemuda secara aktif juga mencerminkan upaya menciptakan masyarakat yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Ketika pemuda diberdayakan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Dengan sinergi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat, pembangunan dapat diwujudkan secara lebih dinamis dan relevan, menjawab kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan potensi generasi mendatang.

2.1.1 Pemuda

Pemuda merupakan individu dalam rentang usia produktif yang memiliki karakteristik khas, seperti sifat revolusioner, optimisme, pemikiran maju, dan semangat yang tinggi. Mereka dilihat dari perspektif sosio-demografis yang mencakup kuantitas dan kualitas generasi muda, sehingga menjadi potensi sumber daya manusia penting bagi pembangunan bangsa (Banurea, 2017). Pemuda juga menjadi motor penggerak masyarakat yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik melalui pemikiran maupun tindakan, untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Keberadaan mereka yang aktif memberikan jaminan bagi pemimpin bangsa terkait keberlangsungan generasi penerus (Napsiyah dkk., 2023).

Selain itu, pemuda dikenal sebagai kelompok yang paling adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka cepat menguasai teknologi baru dan terbuka terhadap gagasan-gagasan segar, menjadikan mereka agen perubahan yang efektif dalam menghadapi tantangan masyarakat. Di sisi lain, mereka memikul tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan generasi sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, pemuda diharapkan menjaga semangat persatuan dalam keberagaman, serta bersikap kritis, kreatif, dan inovatif agar mampu bersaing secara global tanpa melupakan identitas bangsa. Secara usia, definisi pemuda bervariasi tergantung institusi. WHO mendefinisikan pemuda berusia 10-24 tahun, PBB menetapkan rentang 15-24 tahun, sementara UU Kepemudaan Indonesia menetapkan usia 16-30 tahun. Perbedaan ini mencerminkan bahwa konsep pemuda bersifat dinamis dan kontekstual.

Tabel 2.1 Kategori Usia Pemuda Menurut Sejumlah Lembaga Institusi

Institusi	Definisi Umur Pemuda
UN/UNFPA	15-24 tahun
UU No.40 Tahun 2009	16-30 tahun
Badan Pusat Statistik (BPS)	15-29 tahun

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Pemuda, yang umumnya berusia 16-30 tahun, secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Partisipasi mereka dalam pembangunan diharapkan sejalan dengan cita-cita nasional, di mana generasi muda diharapkan dapat mengambil peran aktif sebagai pelopor dalam berbagai inisiatif masyarakat di kalangan mereka sendiri (Pinilas dkk., 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda memiliki beberapa karakteristik seperti: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungJawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Kedudukan pemuda dalam tatanan masyarakat memiliki tanggung Jawab yang besar, karena pada pemuda memiliki beberapa karakteristik yang unggul, seperti:

1. Kemurnian idealismenya;

- 
2. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru;
 3. Semangat pengabdianya;
 4. Spontanitas dan dinamikanya;
 5. Inovasi dan kreativitasnya;
 6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru;
 7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri;
 8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

2.1.2 Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan langkah strategis yang berfokus pada pengembangan potensi dan keterampilan generasi muda untuk berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Pemuda adalah aset berharga bagi suatu negara karena energi, kreativitas, dan inovasi mereka mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial serta politik. Pendidikan yang berkualitas dan peluang kerja yang layak menjadi elemen kunci untuk mempersiapkan pemuda menghadapi tantangan global maupun lokal. Selain itu, pembangunan pemuda juga menitikberatkan pada pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, baik melalui partisipasi politik maupun aktivitas di organisasi masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan kepemimpinan dan memengaruhi kebijakan publik. Dengan pendekatan yang memberdayakan, pemuda diharapkan mampu mencapai potensi maksimal dan membawa perubahan positif di masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dalam 20 tahun mendatang, pembangunan pemuda diperkirakan akan dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, konektivitas digital, dinamika geopolitik, dan tantangan perubahan iklim. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun karakter kebangsaan, dan



memperluas partisipasi pemuda dalam berbagai sektor pembangunan. Pemerintah menetapkan dua prioritas utama dalam kebijakan kepemudaan, yaitu penguatan karakter bangsa dan peningkatan daya saing pemuda. Selain itu, pengembangan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya berolahraga dan pencapaian prestasi di kalangan masyarakat (Efendi, 2020). Tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital juga menuntut kesiapan pemuda melalui pendidikan relevan dan keterampilan yang sesuai. Program inovasi, kewirausahaan, dan proyek lingkungan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan, memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik.

2.1.3 Pemuda dan Tantangan Masa Depan

Lompatan teknologi dan pandemi Covid-19 telah menciptakan disrupsi besar yang mengubah berbagai aspek tatanan sosial, menantang Bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang semakin dinamis. Salah satu langkah strategis adalah membangun sumber daya manusia berkualitas yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Pemuda, sebagai aset bangsa, memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan ini. United Nations, melalui *World Programme of Action for Youth* (2010), menegaskan bahwa imajinasi, cita-cita, dan energi pemuda adalah faktor krusial untuk keberlanjutan pembangunan masyarakat. Untuk mendukung kiprah pemuda, PBB telah menetapkan 15 tindakan prioritas, termasuk pendidikan, pekerjaan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, lingkungan, teknologi informasi, hingga partisipasi aktif pemuda dalam pengambilan keputusan.

Indonesia sendiri menempatkan pemuda sebagai harapan utama untuk memastikan gerak maju bangsa, terutama menjelang puncak bonus demografi pada 2025-2030, ketika kelompok usia produktif berada pada jumlah terbesar. Investasi dalam peningkatan kualitas pemuda menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Potensi pemuda sebagai agen perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi telah terbukti dari sejarah kontribusi mereka dalam berbagai bidang. Untuk



memaksimalkan potensi ini, pemuda harus mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, mereka juga perlu diberdayakan melalui partisipasi dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan upaya menciptakan kesetaraan gender.

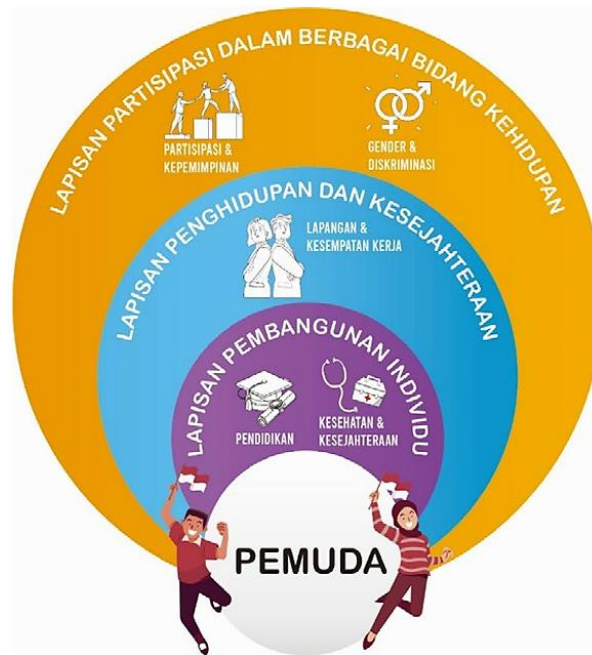
Pemuda sebagai subjek pembangunan memerlukan fasilitasi untuk menjadi generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks ini, pemetaan dan pengkajian capaian pembangunan pemuda menjadi penting. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda di berbagai wilayah dan sektor. IPP memiliki empat fungsi utama: pertama, memberikan informasi lintas wilayah dan sektor terkait kemajuan pembangunan pemuda, sehingga dapat menjadi rujukan kebijakan berbasis data. Kedua, menjadi panduan bagi indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun kelompok pemuda sendiri. Ketiga, berfungsi sebagai alat evaluasi untuk membandingkan kinerja pembangunan pemuda antarwaktu dan antardaerah. Keempat, IPP memberikan gambaran dampak nyata dari kebijakan yang telah disepakati bersama.

Pengukuran IPP kini menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Perhitungan ini memberikan analisis menyeluruh mengenai dinamika kinerja pembangunan pemuda. Data dan informasi yang disajikan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan pemuda. Dengan pendekatan berbasis bukti ini, diharapkan pemuda Indonesia mampu menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan ketimpangan sosial, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan bagi bangsa.

2.1.4 Pengukuran Capaian Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan

pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.



Gambar 2.1 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia

Sumber: Dokumen IPP Nasional 2024

Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, didapatkan gambaran bahwa pembangunan pemuda memiliki tiga lapisan aspek yang kemudian dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusun.

1. Pembangunan Individu

Pembangunan individu pemuda merupakan kebutuhan yang bisa meningkatkan kapasitas individu dalam menjalani kehidupan. Dua hal yang termasuk dalam lapisan ini adalah domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan.

Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan



Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Sesuai dengan metadata, sumber data dari dua domain ini berasal dari Survei Sosial-ekonomi Nasional atau Susenas.

2. Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Penghidupan dan kesejahteraan pemuda tercermin dari meningkatnya akses mereka terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Lapisan ini berkaitan erat dengan peranan pemuda dalam melakukan penetrasi di pasar tenaga kerja. Lapisan ini berisi satu domain yaitu domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Terdapat dua indikator untuk melihat domain ini yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Dua indikator tersebut berasal dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas.

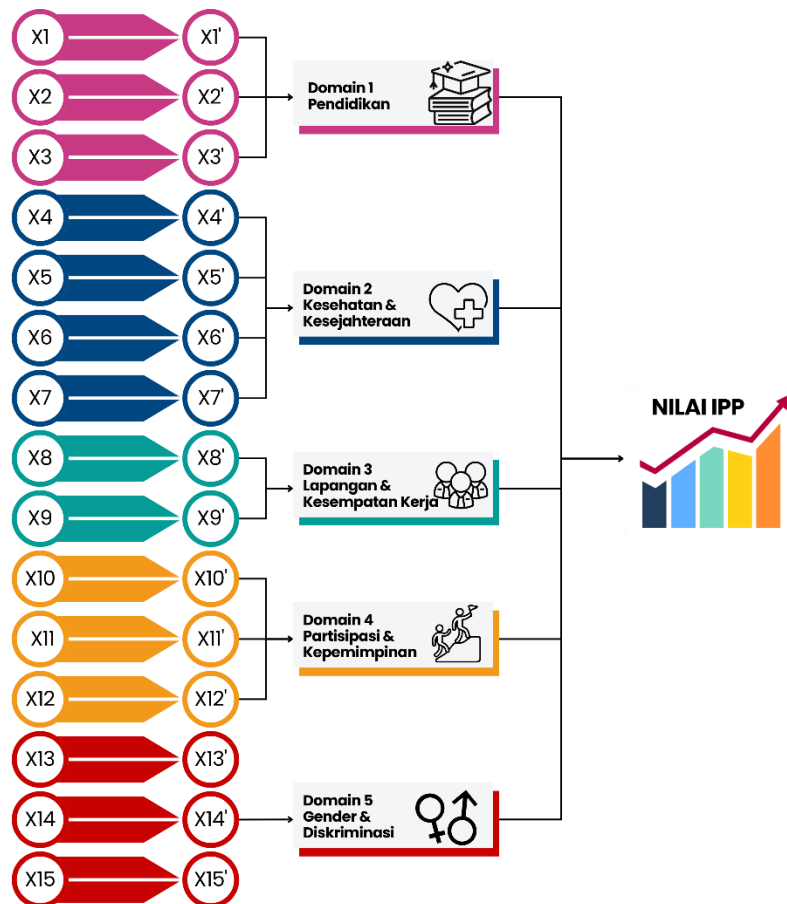
3. Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Sebagai lapisan terluar dari kerangka kerja IPP, lapisan ini melihat tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat dua domain yang pada lapisan ini yaitu domain partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP).

Lapisan ini juga mencantumkan aspek gender dan diskriminasi untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan. Domain gender dan diskriminasi memiliki tiga indikator yakni

angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Data indikator ini berasal dari data Susenas. Juga terdapat indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang datanya berasal dari data Sakernas.



Gambar 2.2 Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP

Sumber: Dokumen IPP Nasional 2024

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan



tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

2.1.5 Peran Pemuda dalam Pembangunan

Dalam proses pembangunan, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik, partisipasi masyarakat, termasuk peran aktif pemuda, sangatlah penting. Sebagai bagian dari masyarakat, pemuda memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan pembangunan. Jika pemuda tidak terlibat secara aktif, pembangunan nasional dapat terhambat atau bahkan gagal. Partisipasi pemuda dalam pembangunan mencakup kontribusi aktif, keterlibatan langsung, serta kemampuan untuk memanfaatkan dan merasakan hasil-hasil pembangunan (Efendi, 2020; Muryadi, 2019).

Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk menjadi kader yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, berkarakter luhur, memiliki keterampilan, dan menyadari tanggung jawab terhadap masa depan. Pemuda memiliki tanggung jawab nasional yang penting untuk memperkuat identitas bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta berkomitmen mendukung pembangunan nasional. Hal ini mencakup mewujudkan kemerdekaan, meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di tingkat nasional maupun daerah demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

1. Partisipasi dalam pemikiran
2. Partisipasi dalam pemikiran
3. Partisipasi Tenaga
4. Partisipasi dengan keahlian

- 
5. Partisipasi dengan barang
 6. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
 7. Partisipasi dengan jasa
 8. Partisipasi dengan uang

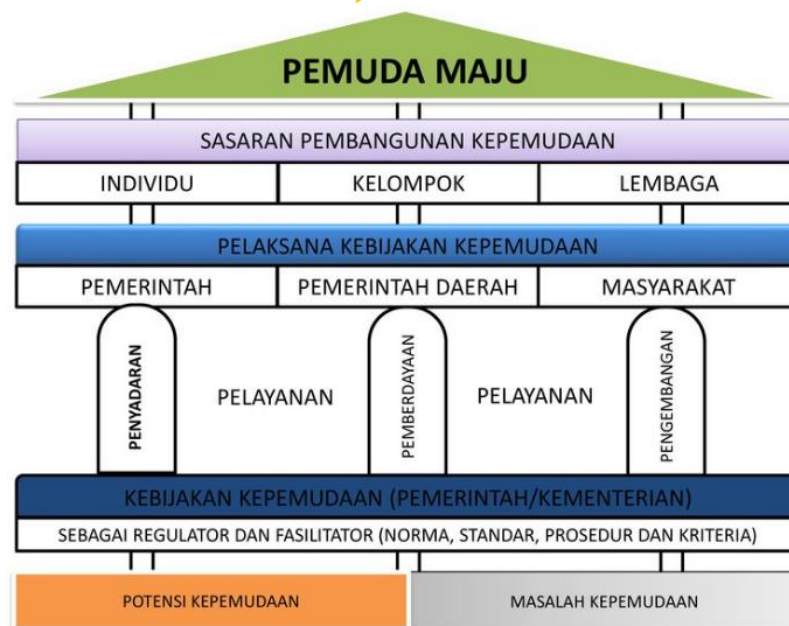
Konsep partisipasi pada dasarnya mengacu pada keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam suatu kegiatan yang diorganisir oleh entitas yang lebih besar. Partisipasi memiliki keterkaitan erat dengan kerjasama, yang mengindikasikan adanya rasa tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

1. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.
2. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

2.1.6 Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan

Dalam pengertian terminologi, kepemudaan mencakup segala hal yang terkait dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pencapaian diri, dan aspirasi pemuda. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dapat diartikan sebagai upaya memfasilitasi semua aspek yang terkait dengan kepemudaan. Untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan, penting dilakukan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberdayakan, dan mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta semangat kepemudaan.



Gambar 2.3 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan

Agar hal tersebut dapat dijalankan, pemerintah daerah membentuk sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengurus urusan kepemudaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh pemuda di setiap daerah.

Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

- a. Pendidikan agama dan akhlak mulia
- b. Pendidikan wawasan kebangsaan
- c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- 
- d. Penumbuhan semangat bela negara
 - e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal
 - f. Pemahaman kemandirian ekonomi
 - g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang
2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
3. Pengembangan Kepemimpinan
- Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:
- a. Pendidikan
 - b. Pelatihan
 - c. Pengaderan
 - d. Pembimbingan
 - e. Pendampingan
 - f. Forum kepemimpinan pemuda
4. Pengembangan Kewirausahaan
- Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian



berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan
- b. Pemagangan
- c. Pembimbingan
- d. Pendampingan
- e. Kemitraan
- f. Promosi
- g. Bantuan akses permodalan

5. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan,
- b. Pendampingan, dan/atau
- c. Forum kepemimpinan pemuda

2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.2.1 Aspek Geografi

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah Provinsi yang berada di Pulau Jawa dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi. Apabila ditinjau dari segi geografis wilayah, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur.

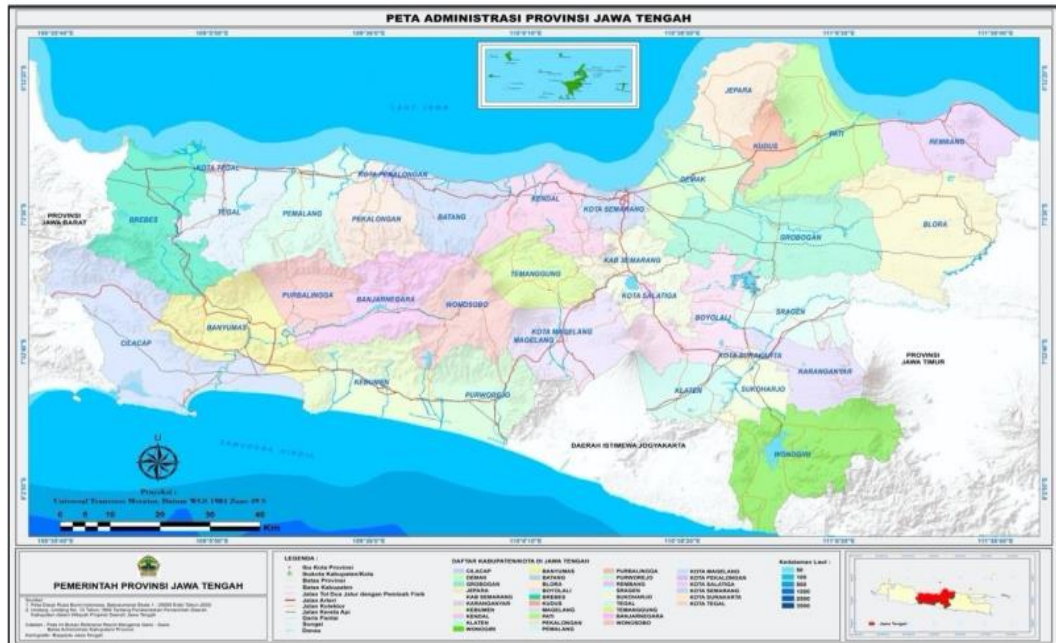
Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia

Barat : Provinsi Jawa Barat

Timur : Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.4 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara administrative, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.809 desa dan 769 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
Kabupaten/Regency				
1	Cilacap	Cilacap	2.323,93	6,77
2	Banyumas	Purwokerto	1.391,15	4,05
3	Purbalingga	Purbalingga	805,76	2,35
4	Banjarnegara	Banjarnegara	1.144,9	3,33
5	Kebumen	Kebumen	1.334,1	3,89
6	Purworejo	Purworejo	1.081,96	3,15
7	Wonosobo	Wonosobo	1.011,62	2,95

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Presentase (%)
8	Magelang	Mungkid	1.129,98	3,29
9	Boyolali	Boyolali	1.096,59	3,19
10	Klaten	Klaten	701,5	2,04
11	Sukoharjo	Sukoharjo	493,53	1,44
12	Wonogiri	Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Karanganyar	Karanganyar	803,05	2,34
14	Sragen	Sragen	994,57	2,90
15	Grobogan	Purwodadi	2.023,85	5,89
16	Blora	Blora	1.957,29	5,70
17	Rembang	Rembang	1.034,54	3,01
18	Pati	Pati	1.572,90	4,58
19	Kudus	Kudus	447,44	1,30
20	Jepara	Jepara	1.020,25	2,97
21	Demak	Demak	977,77	2,85
22	Semarang	Ungaran	1.019,27	2,97
23	Temanggung	Temanggung	864,83	2,52
24	Kendal	Kendal	1.008,12	2,94
25	Batang	Batang	857,27	2,50
26	Pekalongan	Kajen	892,91	2,60
27	Pemalang	Pemalang	1.134,41	3,30
28	Tegal	Slawi	983,9	2,87
29	Brebes	Brebes	1.744,81	5,08
Kota/Municipality				
1	Magelang	Magelang	18,56	0,05
2	Surakarta	Surakarta	46,72	0,14
3	Salatiga	Salatiga	54,98	0,16
4	Semarang	Semarang	370	1,08
5	Pekalongan	Pekalongan	46,20	0,13
6	Tegal	Tegal	39,08	0,11
Jawa Tengah			32.800,69	100

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan wilayah dengan luas terbesar di Provinsi Jawa Tengah, mencakup area sebesar 2.323,93 km² atau sekitar 6,77% dari total luas provinsi tersebut. Sementara itu, Kota Semarang tercatat sebagai kota terluas dengan luas wilayah mencapai 370 km², yang setara dengan 1,08% dari keseluruhan wilayah Jawa Tengah. Di sisi lain, Kota Magelang menjadi kota dengan wilayah terkecil di provinsi ini, hanya memiliki luas 18,56 km² atau sekitar 0,05% dari total luas Jawa Tengah.



Gambar 2.5 Persentase Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

2.2.2 Aspek Demografi

Demografi adalah kajian yang mempelajari dinamika populasi manusia dengan menggunakan analisis statistik untuk memahami jumlah, struktur, dan distribusi penduduk. Kajian ini melibatkan berbagai aspek, seperti angka kelahiran, tingkat kematian, pola migrasi, serta komposisi usia dan jenis kelamin dalam suatu populasi. Data yang dihasilkan dari studi demografi sangat penting karena memberikan gambaran mengenai perubahan populasi suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu. Informasi ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam merancang serta menerapkan kebijakan atau strategi pembangunan yang efektif.

Lebih dari itu, analisis demografi juga memiliki dampak langsung terhadap pembangunan suatu wilayah. Penduduk bukan hanya sebagai sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penggerak utama pembangunan, tetapi juga sebagai penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam konteks pembangunan daerah, penduduk memainkan peran kunci dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya terlibat secara aktif dalam proses pembangunan melalui tenaga, ide, dan keterampilan, tetapi

juga menikmati hasil dari pembangunan yang telah dilakukan. Hal ini menciptakan hubungan yang saling mendukung antara peran penduduk sebagai pelaku aktif dan penerima manfaat pembangunan.

Namun, peran penduduk dalam pembangunan sangat bergantung pada kualitas mereka. Penduduk yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang baik dapat menjadi aset berharga yang mendorong kemajuan daerah. Sebaliknya, penduduk dengan kualitas rendah, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan atau kesehatan, dapat menjadi beban bagi pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk menjadi sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, sehingga potensi mereka dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Berikut merupakan rincian data demografi Provinsi Jawa Tengah:

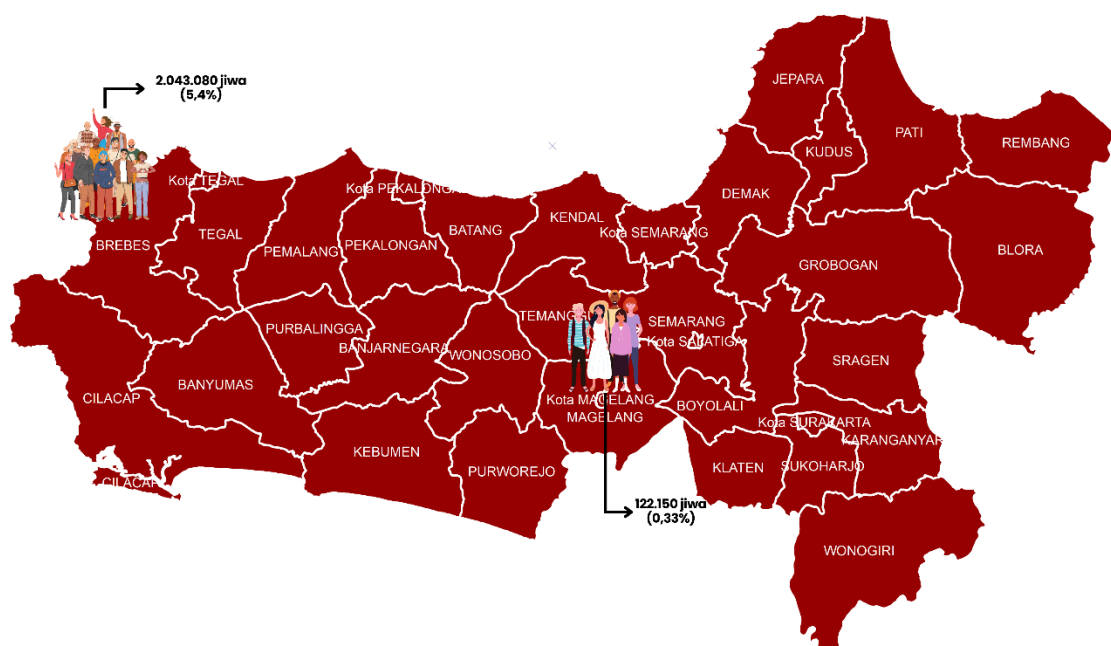
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Kabupaten				
Cilacap	1.988.622	2.008	1.138	893
Banyumas	1.806.013	1.829	930	1.377
Purbalingga	1.019.840	1.027	1.360	1.321
Banjarnegara	1.038.718	1.047	1.311	984
Kebumen	1.376.825	1.398	971	1.048
Purworejo	778.257	788,27	1.073	762
Wonosobo	896.346	909,66	752	924
Magelang	1.312.573	1.330,66	910	1.226
Boyolali	1.079.952	1. 090,13	1.209	1.008
Klaten	1.275.850	1.284	1.064	1.834
Sukoharjo	916.627	932,68	1.946	1.999
Wonogiri	1.057.087	1.051,09	1.964	586
Karanganyar	947.642	955,12	580	1.244
Sragen	992.243	997,49	1.227	1.003
Grobogan	1.470.150	1.493	1.048	756
Blora	888.224	901,62	744	461
Rembang	650.770	660,17	495	636
Pati	1.339.572	1.359	642	864
Kudus	856.472	874,63	898	2.057
Jepara	1.192.811	1.221,09	2.014	1.216
Demak	1.223.217	1.241	1.188	1.382
Semarang	1.068.492	1.080,65	1.363	1.137
Temanggung	799.764	808,45	1.128	929

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
	2022	2023	2022	2023
Kendal	1.033.367	1.053	919	1.050
Batang	813.791	828,88	1.031	967
Pekalongan	986.455	1.007	1.031	1.205
Pemalang	1.500.754	1.523,62	1.180	1.366
Tegal	1.623.595	1.655	1.483	1.682
Brebes	2.010.617	2.043,08	1.846	1.152
Kota				
Magelang	121.675	122,15	6.715	6.585
Surakarta	523.008	526,87	11.878	11.258
Salatiga	195.065	198,92	3.683	3.618
Semarang	1.659.975	1.694,74	4.442	4.534
Pekalongan	309.742	317,52	6.889	7.017
Tegal	278.299	282,78	8.069	7.123
TOTAL	37.032.410	37.540,96	1.138	200

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

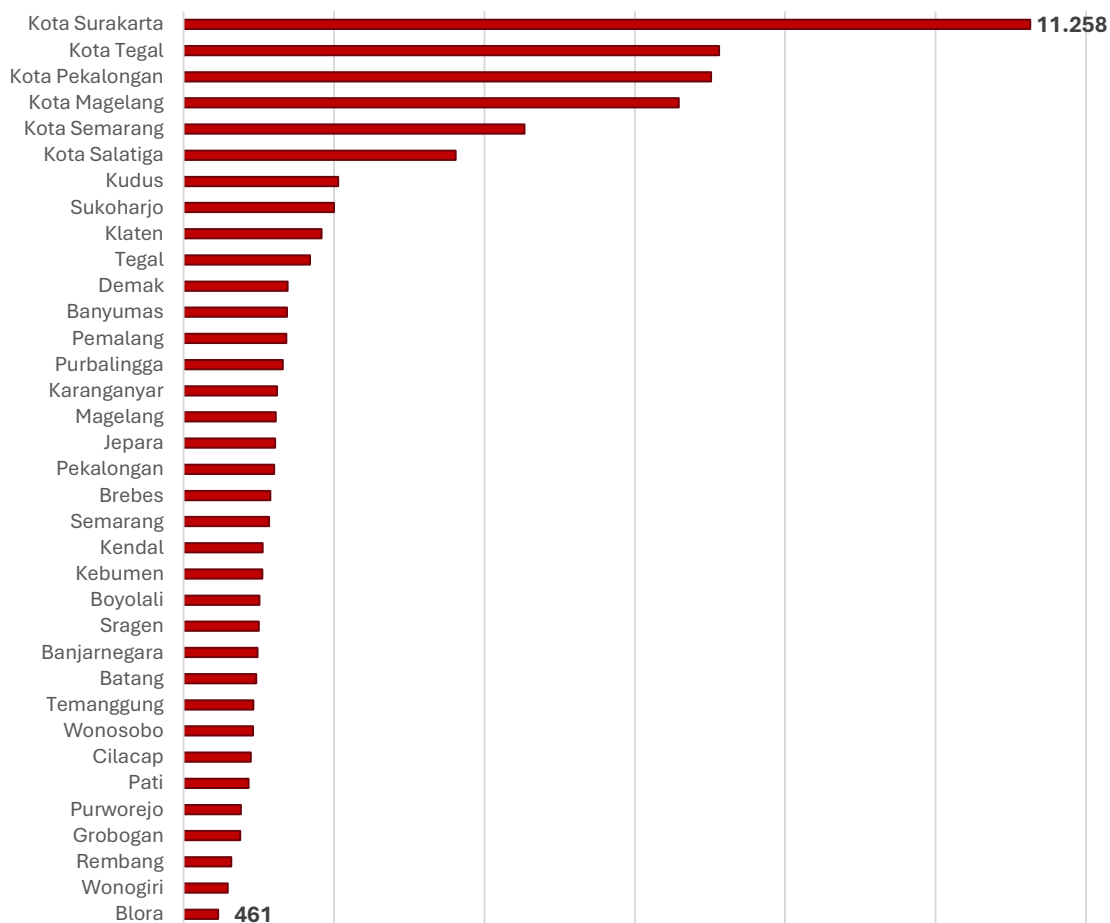
Berdasarkan jumlah penduduk, Kabupaten Brebes menempati posisi pertama sebagai kabupaten dengan populasi terbanyak, yaitu 2.043.080 jiwa atau sekitar 5,4% dari total penduduk Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk sebesar 1.988.622 jiwa, juga setara dengan 5,4% dari total penduduk provinsi. Di sisi lain, Kota Magelang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 122.150 jiwa, yang hanya mencakup 0,33% dari total penduduk di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Telaah lebih lanjut mengenai aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada tingkat kepadatan penduduk per wilayah kabupaten. Kota Surakarta tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah, mencapai 11.258 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, Kabupaten Blora memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah di provinsi ini, yaitu sebesar 461 jiwa per kilometer persegi.



Gambar 2.7 Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Aspek demografi di Provinsi Jawa Tengah dapat dianalisis lebih lanjut melalui struktur usia penduduknya, yang mencerminkan proporsi berbagai kelompok umur dalam populasi. Analisis ini penting untuk memahami karakteristik penduduk berdasarkan tahap kehidupan, seperti usia produktif, usia anak-anak, dan lansia, yang semuanya memiliki implikasi besar terhadap perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Selain struktur usia, aspek demografi juga mencakup rasio jenis kelamin, yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Rasio ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai keseimbangan gender dalam populasi, tetapi juga dapat menjadi indikator penting dalam perencanaan tenaga kerja, pendidikan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Data mengenai jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah, yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika populasi. Informasi ini dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut, yang menyajikan distribusi penduduk berdasarkan kategori usia dan rasio jenis kelamin. Analisis data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

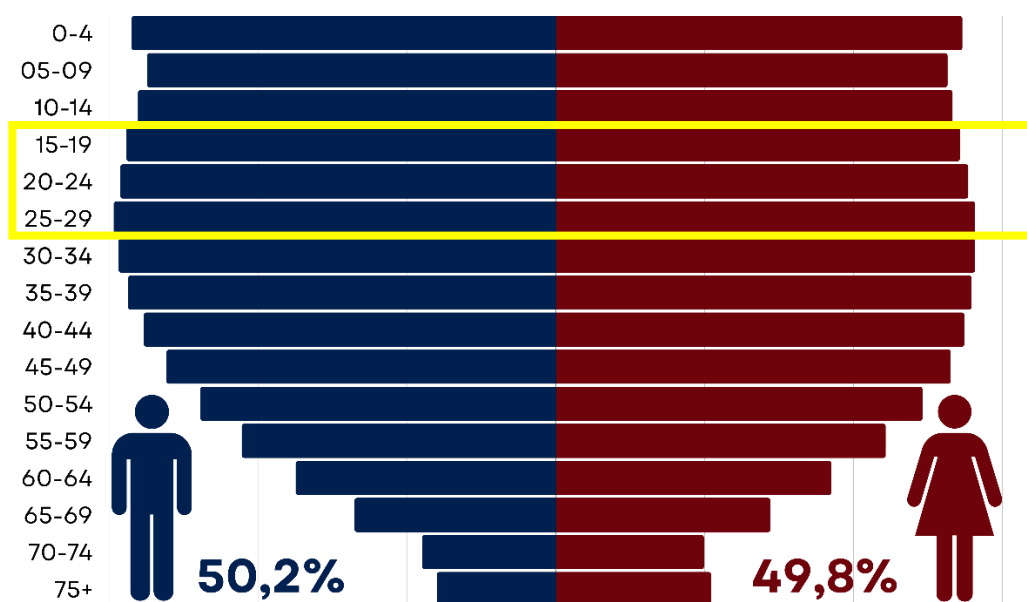
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Rentang Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki - Laki	Perempuan	
0-4	1.426.660	1365660	2.792.320
5-9	1.374.640	1315833	2.690.473
10-14	1.405.280	1332840	2.738.120
15-19	1.443.570	1357180	2.800.750
20-24	1.464.520	1385660	2.850.180
25-29	1.486.760	1408520	2.895.280
30-34	1.470.270	1408660	2.878.930
35-39	1.438.170	1396350	2.834.520
40-44	1.385.610	1372580	2.758.190
45-49	1.309.380	1326710	2.636.090
50-54	1.195.340	1231570	2.426.910
55-59	1.056.360	1108150	2.164.510
60-64	875.080	924970	1.800.050
65-69	677.070	720900	1.397.970
70-74	450.010	497290	947.300
75+	401.200	521650	922.850
Total	18.859.920	18.674.523	37.534.443

Jika mengacu pada data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah diatas, rentang usia pemuda adalah 15 – 29 tahun. **Sesuai dengan hasil konsensus pembahasan rapat, maka dalam penyusunan Naskah IPP Provinsi Jawa Tengah menggunakan rentang umur dari struktur data BPS yaitu antara 15 sd 29 tahun sebagai pendekatan dari standar usia pemuda 16 sd 30 tahun.**

Jumlah penduduk dengan kategori pemuda berdasarkan data di atas adalah sebesar 8.546.210 jiwa atau setara dengan 22,8% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.



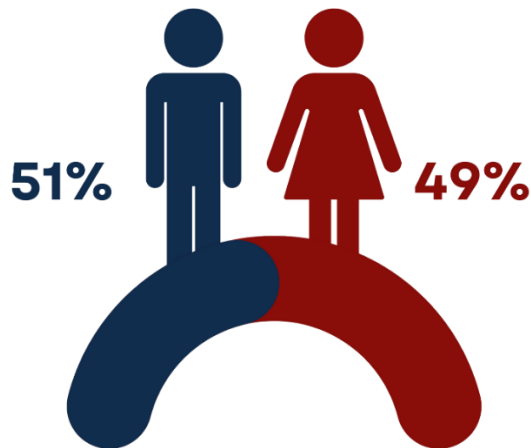
Gambar 2.8 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Umur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024

Jika ditelusuri lebih rinci mengenai rasio jenis kelamin dalam kelompok usia pemuda di Jawa Tengah, ditemukan bahwa 51% dari populasi pemuda adalah laki-laki, sementara 49% lainnya adalah perempuan. Rasio ini menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin di kalangan pemuda, meskipun terdapat sedikit dominasi jumlah pemuda laki-laki.

Distribusi ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemuda. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan data ini untuk merancang program-

program yang relevan dan inklusif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan kedua kelompok. Selain itu, keseimbangan rasio ini dapat mendukung upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerja sama dan partisipasi aktif dari pemuda laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.



Gambar 2.9 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024

2.2.3 Aspek Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui berbagai indikator ekonomi, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, PDRB per kapita, indeks Gini, serta rasio penduduk miskin. PDRB, sebagai salah satu indikator utama, digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi di dalamnya.

PDRB dihitung menggunakan dua pendekatan utama yaitu:

1. **Harga Berlaku (ADHB)** – Menggunakan harga pada tahun perhitungan. ADHB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga saat ini, sehingga berguna untuk menilai kapasitas ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan.
2. **Harga Konstan (ADHK)** – Mengacu pada harga pada tahun tertentu yang dijadikan dasar perhitungan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebenarnya tanpa terpengaruh oleh inflasi atau fluktuasi harga.

Dalam tiga tahun terakhir, baik PDRB ADHB maupun ADHK menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di Provinsi Jawa Tengah:

1. **PDRB ADHB** meningkat dari Rp 1.419,74 triliun pada 2021 menjadi Rp 1.696,80 triliun pada 2023.
2. **PDRB ADHK** juga mengalami kenaikan dari Rp 997,32 triliun pada 2021 menjadi Rp 1.102,56 triliun pada 2023.

Peningkatan terbesar dalam PDRB disumbangkan oleh sektor **industri pengolahan**, yang memberikan kontribusi sebesar 33% terhadap total PDRB, menjadikannya pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sektor ini diikuti oleh **perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor**, yang menyumbang sekitar 15% dari total PDRB.

Analisis PDRB per kategori memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sektor-sektor mana yang menjadi tulang punggung ekonomi suatu wilayah. Dengan informasi ini, pemerintah dapat menentukan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya, seperti meningkatkan efisiensi di sektor industri atau memperluas peluang usaha dalam perdagangan dan jasa.

Perkembangan PDRB yang konsisten selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki dinamika ekonomi yang positif, meskipun tetap diperlukan pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Data lebih rinci mengenai PDRB per kategori dapat dilihat pada tabel berikut untuk mendukung analisis lebih lanjut.

Tabel 2.5 PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2021-2023

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	196.835.030	211.490.540	224.405.330
2	Pertambangan dan Penggalan	36.628.430	37.723.920	38.133.320
3	Industri Pengolahan	486.957.680	529.612.560	577.429.040
4	Pengadaan listrik dan gas	1.377.810	1.438.000	1.558.620
5	Pengadaan air	915.500	938.290	986.310
6	Konstruksi	158.056.340	172.199.810	190.320.160

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
7	Perdagangan besar dan eceran	195.399.040	212.208.010	230.872.970
8	Transportasi dan Perdagangan	32.076.430	59.256.750	69.538.670
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	43.040.370	51.316.310	57.757.140
10	Informasi dan komunikasi	60.910.560	62.593.230	69.420.570
11	Jasa keuangan dan asuransi	42.944.780	46.920.610	48.965.200
12	Real estate	23.741.780	25.420.790	27.455.790
13	Jasa perusahaan	5.650.010	6.259.700	6.975.590
14	Administrasi pemerintahan	35.853.140	37.421.330	39.870.000
15	Jasa pendidikan	64.584.460	65.985.530	70.550.280
16	Jasa kesehatan	13.800.240	14.372.310	15.533.750
17	Jasa lainnya	20.963.550	24.413.400	27.022.680
	Jumlah PDRB	1.419.735.150	1.559.571.100	1.696.795.420

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024

Sementara itu, berdasarkan Nilai PDRB ADHK (tahun dasar 2010), perkembangan dari tahun 2021 hingga 2023 beserta kontribusi dari masing-masing kategori dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.6 PDRB ADHK 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2021-2023

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	127.065.840	130.762.520	131.397.460
2	Pertambangan dan Penggalian	22.326.160	20.942.660	21.263.340
3	Industri Pengolahan	333.239.630	346.169.650	361.085.420
4	Pengadaan listrik dan gas	1.170.510	1.214.860	1.298.530
5	Pengadaan air	744.860	752.410	783.420
6	Konstruksi	106.701.150	108.657.610	115.212.050
7	Perdagangan besar dan eceran	147.313.380	153.670.440	161.330.840
8	Transportasi dan Perdagangan	24.335.820	42.103.030	45.523.390
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	32.595.120	38.132.450	42.417.200
10	Informasi dan komunikasi	62.288.940	63.846.510	70.658.780
11	Jasa keuangan dan asuransi	27.545.690	27.690.760	28.289.100
12	Real estate	19.133.490	20.107.100	21.494.520
13	Jasa perusahaan	3.816.620	4.051.190	4.344.410
14	Administrasi pemerintahan	24.528.680	24.915.020	25.944.090
15	Jasa pendidikan	38.974.990	39.589.050	41.951.570
16	Jasa kesehatan	9.471.680	9.709.660	10.274.550

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023
17	Jasa lainnya	16.068.570	17.963.160	19.294.490
	Jumlah PDRB	997.321.130	1.050.278.090	1.102.563.180

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2024

Demikian pula pada PDRB ADHK di Provinsi Jawa Tengah, sektor dengan kontribusi terbesar adalah **Industri Pengolahan**, diikuti oleh **Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**.

2.3 ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN JAWA TENGAH

Berdasarkan tinjauan permasalahan dan potensi pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis seperti berikut:

1. Peningkatan kerjasama lintas sector dalam penyediaan data kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penguatan kebijakan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk penyusunan regulasi, maupun penyusunan rencana aksi sebagai dasar pembangunan kepemudaan.
3. Penguatan fungsi organisasi pemuda sebagai wadah dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan.
4. Penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan: program-program yang mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Peningkatan pemberdayaan pemuda untuk mengurangi angka pengangguran pemuda melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia Pendidikan.



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

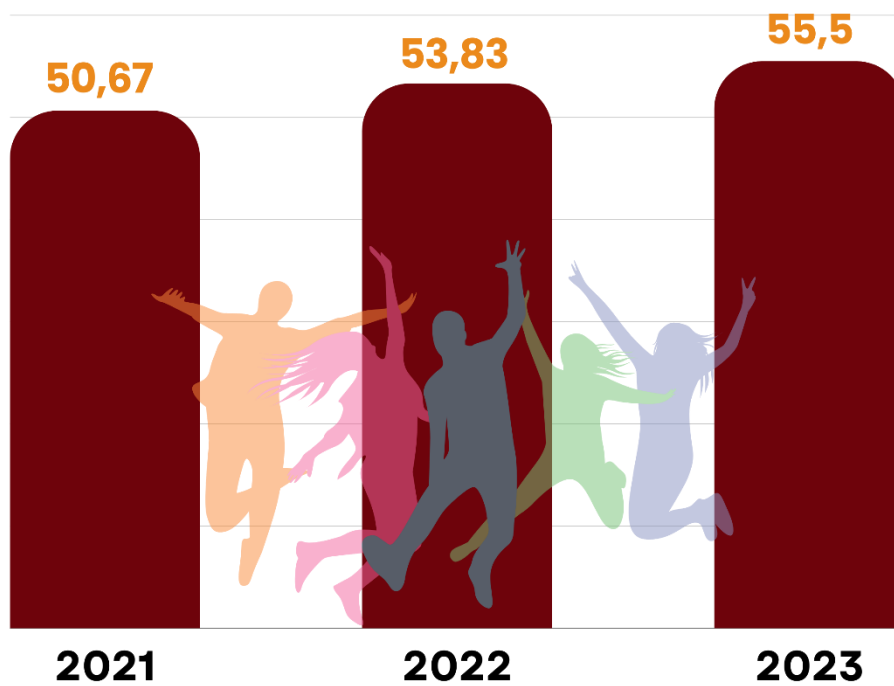
BAB 3

DINAMIKA CAPAIAN IPP PROVINSI JAWA TENGAH & METODOLOGI

**NASKAH
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
PROVINSI JAWA TENGAH 2024**

3.1 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Tren nilai IPP Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dapat terlihat dari capaian pada tahun 2021 sebesar 50,67, capaian pada tahun 2022 sebesar 53,83, dan capaian pada tahun 2023 sebesar 55,5.



Gambar 3.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumen IPP Nasional 2024

Hingga tahun 2023 sejak dikeluarkannya nilai IPP, Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan perhitungan nilai IPP sendiri. Perhitungan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah selalu dilakukan pada tingkat nasional yaitu oleh Kemenpora. Hingga pada tahun 2024 ini, Provinsi Jawa Tengah berinisiatif untuk melakukan perhitungan IPP secara mandiri.

Dalam melakukan perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah, maka dibutuhkan adanya perhitungan pada tiap domain penyusun IPP, yaitu:

1. Domain Pendidikan
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

- 
3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja
 4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
 5. Domain Gender dan Diskriminasi

Berikut merupakan penjelasan dari capaian masing – masing domain pembentuk IPP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 – 2023.

3.1.1 Capaian Domain Pendidikan

Domain Pendidikan terdiri dari tiga indikator utama yang mencerminkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi pemuda. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rata – rata Lama Sekolah

Mengukur jumlah tahun rata-rata pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pemuda. Rata-rata lama sekolah menjadi parameter penting untuk menilai pencapaian pendidikan secara keseluruhan, serta kesetaraan akses pendidikan di berbagai wilayah.

2. APK Sekolah Menengah

Indikator ini mengukur persentase pemuda dalam rentang usia sekolah menengah yang terdaftar di institusi pendidikan menengah, tanpa memandang apakah mereka sesuai dengan usia standar. APK ini menunjukkan sejauh mana akses pendidikan menengah tersedia dan dimanfaatkan oleh pemuda di suatu wilayah.

3. APK Perguruan Tinggi

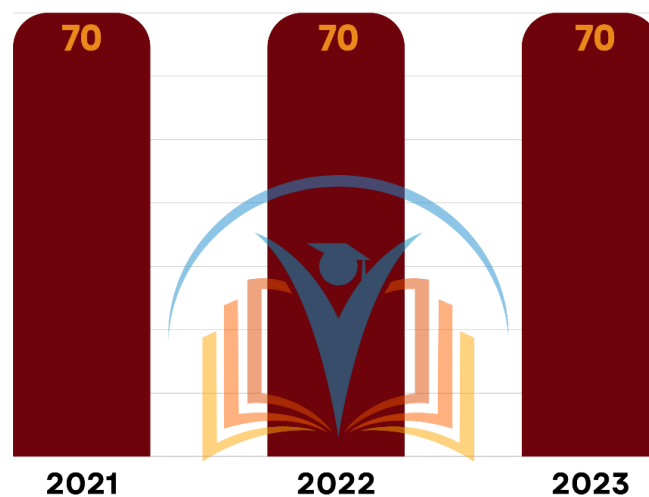
Mengukur persentase pemuda dalam kelompok usia pendidikan tinggi yang terdaftar di institusi perguruan tinggi. APK Perguruan Tinggi memberikan gambaran tentang aksesibilitas dan keikutsertaan pemuda dalam pendidikan lanjutan, yang menjadi kunci peningkatan kompetensi dan daya saing mereka di dunia kerja.

Peningkatan terjadi pada rata-rata lama sekolah pemuda, di mana pada tahun 2021 adalah sebesar 10,56, tahun 2022 sebesar 10,57, dan pada

tahun 2023 capaian berada di angka 10,61. Pada indikator APK Sekolah Menengah, tahun 2021 angka capaiannya sebesar 90,26 dan naik pada tahun 2022 menjadi berada di angka 90,44. Namun capaian indikator ini pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi berada di angka 90,25.

Berkaitan dengan indikator APK Perguruan Tinggi, kenaikan angka capaian indikator dialami oleh Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021 angka capaian indikator ini sebesar 23,86, kemudian naik pada tahun 2022 menjadi berada di angka 23,95, dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi sebesar 24,78.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam tiga tahun terakhir, nilai capaian Domain Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan stagnan, dengan angka yang tetap di kisaran 70. Meskipun angka tersebut masih mencerminkan tingkat pencapaian yang cukup baik, stagnansi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan lebih lanjut agar dapat mendorong pemuda untuk lebih aktif dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.



Gambar 3.2 Capaian Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Sumber: Kemenpora, 2024

3.1.2 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup empat indikator utama yang memberikan gambaran tentang kondisi fisik, mental, serta kesejahteraan sosial pemuda. Keempat indikator ini meliputi:

1. Angka Kesakitan Pemuda

Indikator ini mengukur tingkat prevalensi penyakit di kalangan pemuda, yang mencakup baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Angka kesakitan yang tinggi menunjukkan adanya masalah kesehatan yang signifikan dalam kelompok usia ini, yang bisa berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup mereka. Penyakit kronis, gangguan mental, dan gaya hidup tidak sehat dapat menjadi penyebab utama dari meningkatnya angka kesakitan di kalangan pemuda.

2. Persentase Pemuda Korban Kejahatan

Indikator ini mengukur seberapa besar jumlah pemuda yang menjadi korban kejahatan, baik itu kekerasan fisik, perundungan, atau kejahatan lainnya. Kejahatan terhadap pemuda sering kali berkaitan dengan masalah sosial dan ekonomi, serta kurangnya kesadaran mengenai perlindungan hukum. Meningkatnya angka pemuda sebagai korban kejahatan menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap upaya preventif dan pendidikan hukum di kalangan pemuda.

3. Persentase Pemuda yang Merokok

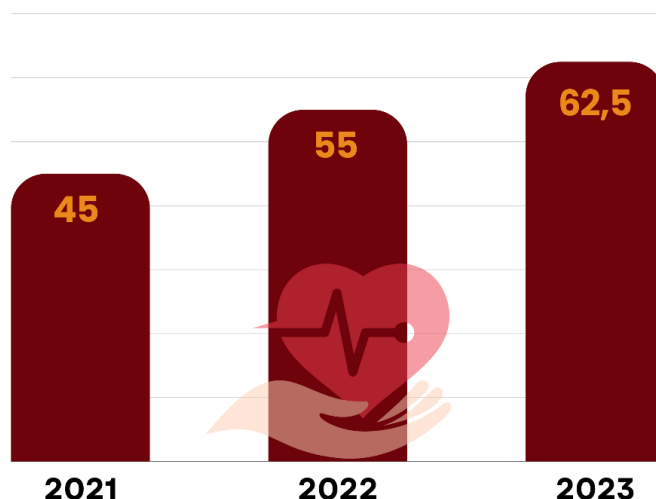
Merokok merupakan salah satu perilaku yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan pemuda, mengarah pada masalah pernapasan, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Persentase pemuda yang merokok mengindikasikan kebiasaan yang berbahaya, yang tidak hanya mempengaruhi individu tersebut, tetapi juga dapat meningkatkan beban biaya kesehatan masyarakat. Intervensi untuk mengurangi kebiasaan merokok di kalangan pemuda sangat diperlukan, melalui edukasi, pembatasan akses, dan kampanye anti-merokok.

4. Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil

Indikator ini mengukur prevalensi kehamilan di kalangan remaja perempuan, yang sering kali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan seksual, keterbatasan layanan kesehatan,

dan pernikahan dini. Kehamilan pada usia muda dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, serta menghambat pendidikan dan perkembangan karier remaja perempuan. Upaya untuk menurunkan angka kehamilan remaja sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda, khususnya perempuan, dan mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh permasalahan ini.

Dalam kurun waktu 2021 – 2023, capaian nilai Domain Kesehatan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah mengalami tren peningkatan. Hal ini dapat terlihat dimana pada tahun 2021 capaian nilai domain ini berada di angka 45 kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi berada di angka 55. Tren kenaikan ini terus terjadi hingga tahun 2023 yang berhasil mencapai angka 62,5.



Gambar 3.3 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023

Sumber: Kemenpora, 2024

Kenaikan pada capaian nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah ini didukung dengan semakin membaiknya capaian pada masing – masing indikator penyusun domain. Pada indikator angka kesakitan pemuda, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai angka 16,61, kemudian berhasil turun di angka 10,68 pada tahun 2022, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi berada di angka 7,28.



Pada indikator Persentase Pemuda Korban Kejahatan, pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,66 dan kemudian turun menjadi 0,38 pada tahun 2022. Namun terjadi kenaikan walaupun tidak signifikan pada tahun 2023 menjadi berada di angka 0,49. Pada indikator Persentase Pemuda yang Merokok, terjadi sedikit peningkatan angka capaian dimana pada tahun 2021 berada di angka 25,83 kemudian naik menjadi 26,52 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 26,37 pada tahun 2023.

Indikator penyusun Kesehatan dan Kesejahteraan yang terakhir adalah Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil. Pada tahun 2023, angka capaian Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 23,71 dan mengalami stagnansi hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, capaian indikator ini turun menjadi berada di angka 20,91.

3.1.3 Capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mencakup dua indikator utama yang berfokus pada peran pemuda dalam dunia kerja dan peluang mereka untuk terlibat dalam sektor ekonomi. Kedua indikator ini adalah:

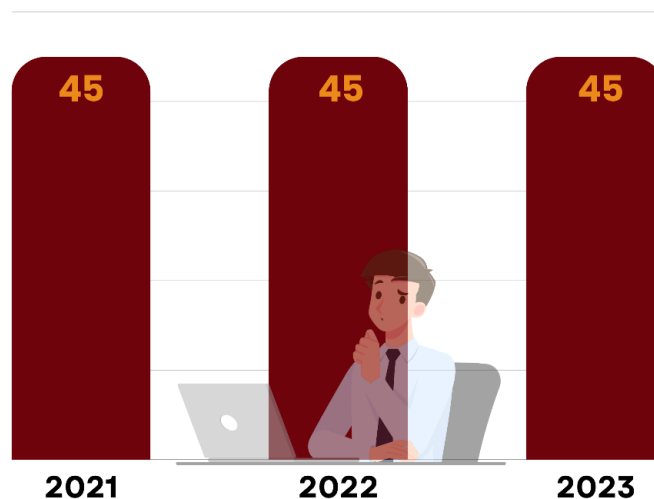
1. Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Indikator ini mengukur jumlah pemuda yang terlibat dalam **wirausaha sektor non-teknis**, atau sering disebut wirausaha kerah putih. Wirausaha ini mencakup pemuda yang menjalankan bisnis di bidang jasa, perdagangan, teknologi informasi, dan sektor ekonomi kreatif lainnya. Keberadaan pemuda wirausaha kerah putih sangat penting karena mereka memainkan peran besar dalam **pengembangan ekonomi lokal** dan **inovasi**. Pemuda yang menjadi wirausaha kerah putih cenderung lebih fleksibel, memiliki kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mendukung terciptanya ekonomi yang berbasis kreativitas dan keterampilan. Peningkatan jumlah wirausahawan muda akan berdampak positif terhadap **penciptaan lapangan pekerjaan**, pengurangan angka pengangguran, dan pemanfaatan teknologi serta ide-ide kreatif dalam dunia bisnis.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

Indikator ini mengukur persentase pemuda yang terdaftar sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. TPT Pemuda menjadi indikator penting untuk mengukur **kesempatan kerja** bagi pemuda dalam dunia kerja formal. Tingginya angka TPT menunjukkan adanya **kesenjangan antara kebutuhan keterampilan dan peluang kerja** yang ada, serta tantangan dalam menyelaraskan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, angka TPT yang rendah menunjukkan adanya **akses yang baik** bagi pemuda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilan mereka. Peningkatan TPT di kalangan pemuda dapat menunjukkan perlunya perbaikan dalam **sistem pendidikan dan pelatihan vokasi**, serta pengembangan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja muda secara produktif.

Capaian nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 – 2023 mengalami stagnansi yaitu berada di angka **45**.



Gambar 3.4 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

Sumber: Kemenpora, 2024

Stagnansi yang terjadi pada capaian nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja wilayah Provinsi Jawa Tengah diakibatkan pada nilai



pada indikator – indikatornya yang tidak berubah banyak. Pada indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mampu mencapai angka 0,42 dan kemudian naik menjadi 0,53. Kenaikan ini juga berlanjut hingga pada tahun 2023 dimana nilai capaian indikator ini adalah sebesar 0,56.

Capaian pada indikator TPT Pemuda, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 berada di angka 13,24 dan kemudian berhasil menurunkan angka capaian menjadi sebesar 11,87 pada tahun 2022. Namun pada 2023, angka capaian indikator ini kembali naik menjadi berada di angka 13,46 yang mana kenaikan ini menunjukkan adanya kenaikan pada pengangguran di lingkup pemuda Provinsi Jawa Tengah.

3.1.4 Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam perkembangan pemuda, yang mencakup keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, organisasi, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Indikator dalam domain ini menggambarkan sejauh mana pemuda berperan aktif dalam **kehidupan sosial** dan **politik**, serta bagaimana mereka dapat mempengaruhi dan berkontribusi pada perubahan dalam masyarakat. Tiga indikator utama dalam domain ini adalah:

1. Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam **aktivitas sosial** dan kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk **memperkuat solidaritas sosial, menanggulangi masalah sosial**, serta **mendorong perubahan sosial yang positif**. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat berupa partisipasi dalam **kampanye sosial, program kemanusiaan**, serta **kegiatan keagamaan** atau **lingkungan** yang berfokus pada kepentingan umum. Pemuda yang aktif dalam kegiatan ini tidak hanya mengembangkan kemampuan organisasi dan kepemimpinan,



tetapi juga memiliki kesempatan untuk **meningkatkan kesadaran sosial** dan berperan dalam **pembangunan komunitas**.

2. Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi

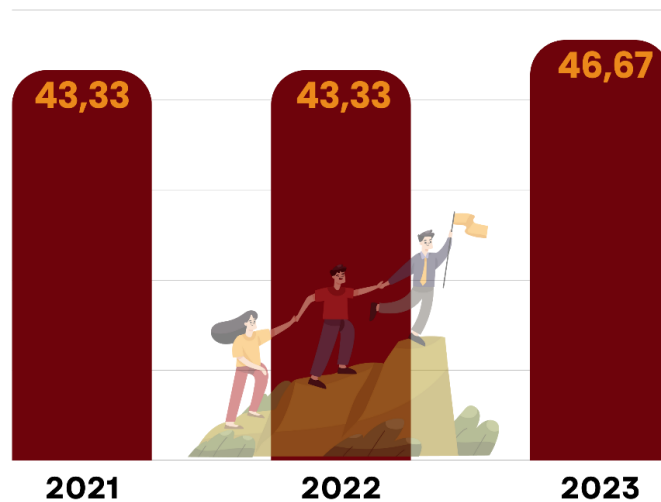
Organisasi, baik itu berbasis kepemudaan, pendidikan, atau profesi, memberikan ruang bagi pemuda untuk **mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berkolaborasi, serta berinovasi**. Indikator ini mencerminkan seberapa banyak pemuda yang terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut dan **aktif berpartisipasi** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Keterlibatan dalam organisasi membantu pemuda untuk **membangun jaringan sosial, mengembangkan keterampilan interpersonal, serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial**. Partisipasi aktif dalam organisasi juga memberikan pengalaman berharga dalam **manajemen, komunikasi, dan pemecahan masalah**.

3. Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat

Indikator ini menilai sejauh mana pemuda dilibatkan dalam **proses pengambilan keputusan** dan memberikan kontribusi pemikiran dalam forum-forum diskusi atau rapat. Keterlibatan pemuda dalam memberikan saran atau pendapat menunjukkan adanya **pemberdayaan dan penghargaan terhadap suara pemuda** dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Ini juga mencerminkan seberapa jauh pemuda dipandang sebagai **agen perubahan** yang dapat menyuarakan aspirasi, kritik, dan ide untuk perbaikan bersama. Pemuda yang terlibat aktif dalam rapat memiliki kesempatan untuk **mengasah kemampuan analisis, berkomunikasi secara efektif, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat**.

Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021-

202 terjadi stagnansi capaian yaitu sebesar 43,33 dan kemudian naik pada tahun 2023 sehingga berada di angka 46,67.



Gambar 3.5 Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

Sumber: Kemenpora, 2024

Kenaikan angka capaian domain ini dipengaruhi oleh capaian pada masing – masing indikatornya. Pada indikator Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 – 2022 mengalami stagnansi angka capaian yaitu sebesar 76,77 yang kemudian pada tahun 2023 berhasil naik menjadi 80,29.

Pada indikator Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi juga terjadi stagnansi angka capaian pada tahun 2021 – 2022 yaitu sebesar 8,19 dan kemudian berhasil naik pada tahun 2023 sehingga berada di angka 8,31. Hal yang sama juga terjadi pada capaian indikator Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dimana pada tahun 2021 – 2022 terjadi stagnansi angka capaian yaitu berada di angka 6,03. Angka ini berhasil naik menjadi 6,91 pada tahun 2023.

3.1.5 Capaian Domain Gender dan Diskriminasi

Domain Gender dan Diskriminasi mencakup tiga indikator utama yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender dan potensi terjadinya diskriminasi. Ketiga indikator tersebut adalah:

1. Angka Perkawinan Usia Anak



Mengukur persentase individu yang menikah di bawah usia legal, yang seringkali menjadi indikator ketidaksetaraan gender. Tingginya angka ini mencerminkan tantangan signifikan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya terkait hak pendidikan dan kesehatan.

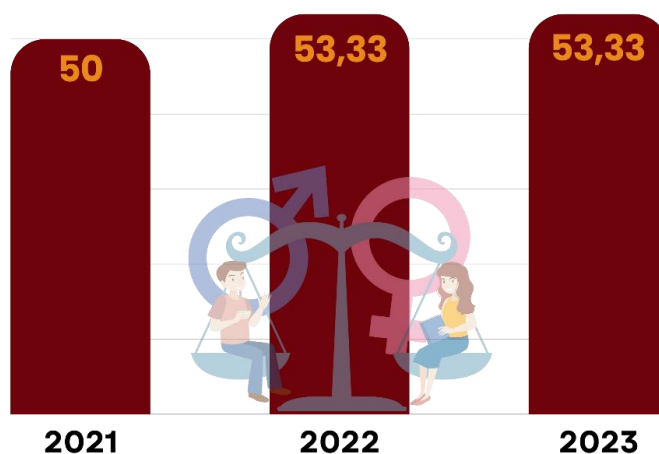
2. Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi

Indikator ini menunjukkan proporsi perempuan muda yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atau perguruan tinggi. Capaian pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang yang lebih baik dalam hal pengembangan karier, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan.

3. Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan muda dalam pekerjaan sektor formal, yang biasanya menawarkan kondisi kerja yang lebih stabil, penghasilan yang lebih baik, dan perlindungan tenaga kerja. Rendahnya angka partisipasi di sektor ini dapat mengindikasikan adanya hambatan struktural atau budaya yang menghalangi perempuan untuk berkembang secara ekonomi.

Pada rentang tahun 2021 – 2022, capaian pada Domain Gender dan Diskriminasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, capaian domain ini berada di angka 50 kemudian naik menjadi 53,33 pada tahun 2022 dan angka ini mengalami stagnansi hingga 2023 dimana angka capaiannya tetap berada di 53,33.



Gambar 3.6 Capaian Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

Sumber: Kemenpora, 2024

Angka capaian domain ini didukung oleh angka capaian pada masing – masing indikator pengungkutnya. Pada indikator Angka Perkawinan Usia Anak, pada tahun 2021 hingga 2022, angka capaian pada indikator ini mengalami stagnansi dengan berada di angka 9,75. Pada tahun 2023, capaian angka capaian indikator ini mengalami penurunan dengan mampu mencapai angka 7,82.

Capaian pada indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah mengalami stagnansi pada tahun 2021 - 2022 dimana berada di angka 38,35 dan kemudian naik pada tahun 2023 menjadi berada di angka 38,88.

Indikator terakhir yang menjadi salah satu penyusun Domain Gender dan Diskriminasi adalah Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2021 angka capaian indikator ini berada di angka 29,01. Angka ini kemudian naik pada tahun 2022 menjadi sebesar 30,67 dan kemudian turun pada tahun 2023 sehingga berada di angka 30,15.

3.2 METODOLOGI

Metodologi perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini menggunakan sejumlah



indikator kunci yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Setiap indikator dipilih berdasarkan relevansinya dalam mencerminkan kondisi pemuda serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional secara menyeluruh. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercaya dan dianalisis menggunakan teknik statistik yang akurat guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Dengan metode ini, IPP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai panduan strategis dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda.

3.2.1 Metodologi Pendekatan

Pendekatan adalah kerangka berpikir yang disusun secara sistematis untuk memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan, dengan merujuk pada aspek atau bidang tertentu yang relevan. Pendekatan ini dirancang agar sejalan dengan konteks, latar belakang, serta maksud dan tujuan utama dari pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Dalam praktiknya, pendekatan membantu mengarahkan proses analisis, pengambilan keputusan, dan implementasi tindakan secara terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan pendekatan yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kajian ini antara lain:

1. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan komprehensif adalah strategi atau metode yang mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dalam menghadapi suatu masalah atau tugas. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada satu aspek tertentu, tetapi berusaha untuk mengintegrasikan semua elemen yang relevan untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam hal Indeks Pembangunan Pemuda, pendekatan komprehensif akan mencakup berbagai aspek seperti tingkat



pendidikan, status kesehatan, tingkat pengangguran, peran serta dalam masyarakat, serta diskriminasi gender.

Pendekatan komprehensif memiliki keunggulan karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif dan efektif, dengan mempertimbangkan seluruh faktor yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir. Namun, pendekatan ini juga bisa lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya dibandingkan dengan pendekatan yang lebih fokus atau parsial.

2. Pendekatan Literatur

Pendekatan literatur adalah metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber literatur atau referensi tertulis. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian, baik di bidang akademis maupun non-akademis, untuk mengkaji teori, konsep, atau temuan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan topik tertentu.

Pendekatan literatur dimulai dengan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Setelah bahan-bahan ini terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan kajian kritis terhadap literatur tersebut. Ini melibatkan analisis mendalam untuk memahami bagaimana berbagai sumber saling berhubungan, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, dan mengevaluasi kualitas serta kredibilitas sumber yang digunakan.

Tujuan dari pendekatan literatur adalah untuk memberikan landasan teori yang kuat bagi penelitian atau proyek yang sedang dilakukan. Dengan memahami apa yang telah diketahui sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut, mengembangkan hipotesis yang lebih terinformasi, dan memberikan konteks yang lebih kaya bagi temuan mereka sendiri.



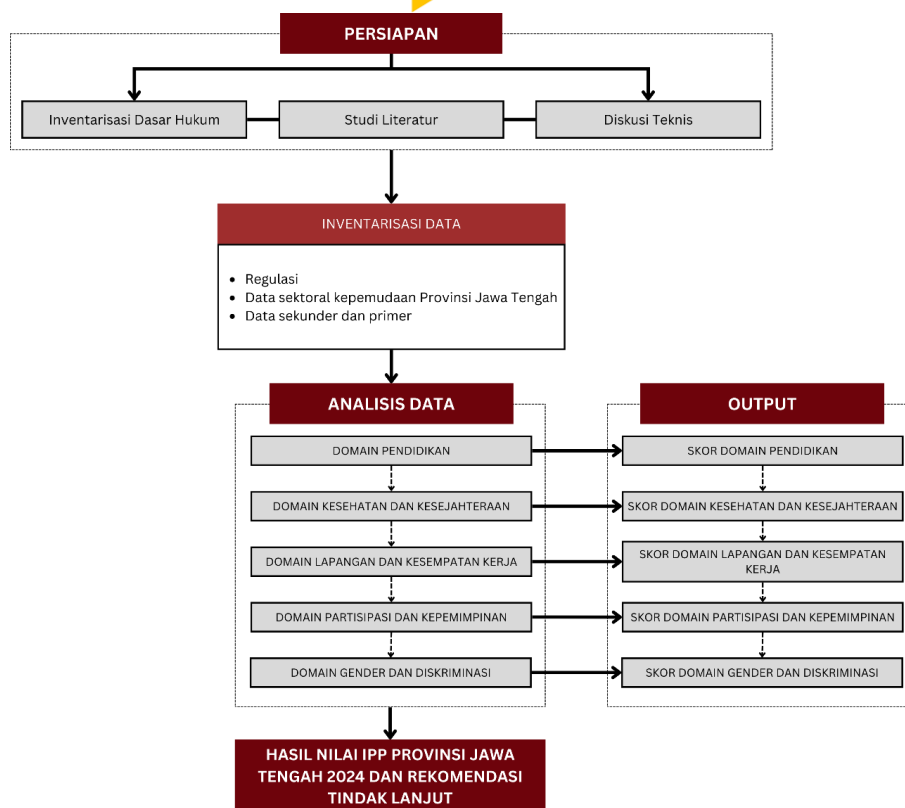
3. Survei Langsung di Lapangan

Pendekatan survei lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lingkungan atau populasi yang menjadi objek studi. Pendekatan ini melibatkan pengamatan, wawancara, kuesioner, atau bentuk lain dari interaksi langsung dengan responden atau subjek penelitian di lokasi atau konteks alamiah mereka.

Survei lapangan digunakan untuk mendapatkan data empiris yang nyata dan terkini. Pendekatan ini sangat bermanfaat ketika peneliti ingin memahami perilaku, pendapat, atau kondisi yang ada dalam situasi tertentu, serta menguji hipotesis atau asumsi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan terjun langsung ke lapangan, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

3.2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir kajian ini disusun berdasarkan latar belakang, maksud, tujuan dan ruang lingkup (metode pelaksanaan). Secara rinci runtutan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan ini dijelaskan pada diagram alur sebagai berikut:



Gambar 3.7 Kerangka Pikir Kajian

Sumber: Tim Penulis, 2024

3.2.3 Metodologi Perhitungan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah 2024

Indeks adalah alat ukur standar yang dirancang untuk menilai kinerja atau capaian dalam suatu aspek atau pembangunan tertentu. Indeks ini disusun melalui penggabungan sejumlah variabel atau nilai dari berbagai elemen individu menjadi satu ukuran gabungan. Dalam konteks statistik dan penelitian, indeks merepresentasikan perubahan dalam sekelompok data yang mewakili sejumlah titik data individu. Indeks sering disebut juga sebagai indikator komposit karena mencakup penggabungan berbagai indikator individu berdasarkan model tertentu.

Menurut OECD (2005), indikator didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari fakta yang diamati dan digunakan untuk menunjukkan posisi relatif suatu entitas, seperti negara, dalam bidang tertentu. Ketika dianalisis secara berkala, indikator dapat membantu mengidentifikasi arah perubahan atau tren dari berbagai unit dalam kurun waktu tertentu. Dalam analisis kebijakan, indikator sangat penting untuk memahami tren, mengarahkan perhatian pada isu strategis,



menetapkan prioritas kebijakan, serta melakukan pemantauan atau perbandingan kinerja antarentitas.

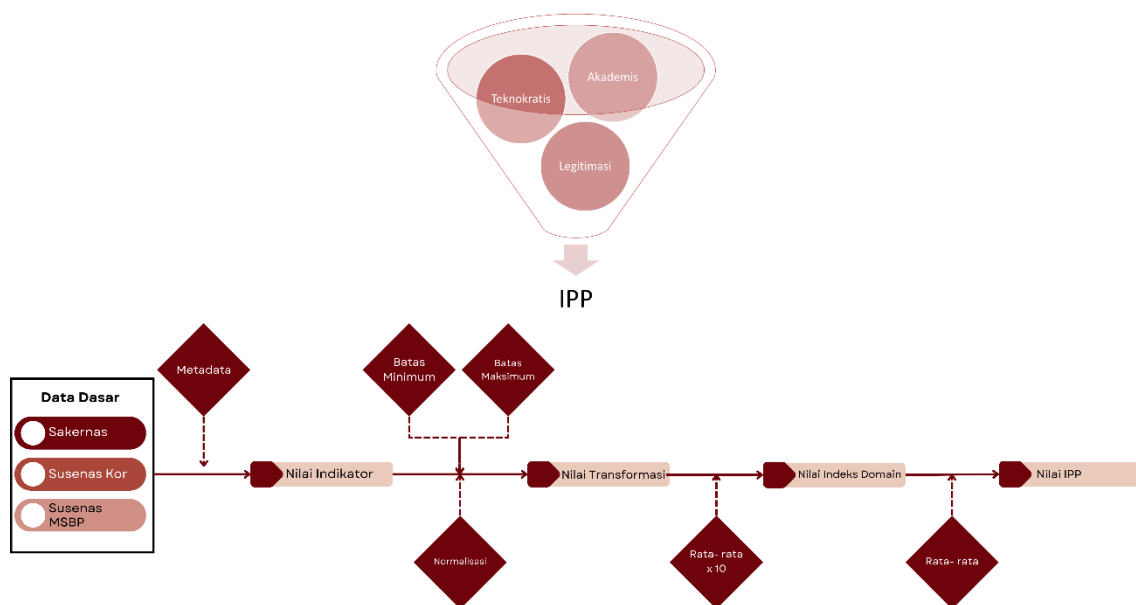
Indikator komposit, yang menggabungkan beberapa indikator individu menjadi satu indeks, sangat bermanfaat dalam mengukur konsep multidimensi yang tidak dapat direpresentasikan hanya dengan satu indikator tunggal. Contoh konsep multidimensi mencakup daya saing, keberlanjutan, industrialisasi, integrasi pasar tunggal, dan masyarakat berbasis pengetahuan. Penggunaan indikator komposit semakin populer dalam analisis kebijakan dan komunikasi publik karena kemampuannya menyederhanakan isu kompleks, memungkinkan perbandingan antarwilayah, serta mempermudah interpretasi bagi masyarakat umum. Namun, penggunaan indikator komposit memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan salah interpretasi atau kebijakan yang tidak tepat.

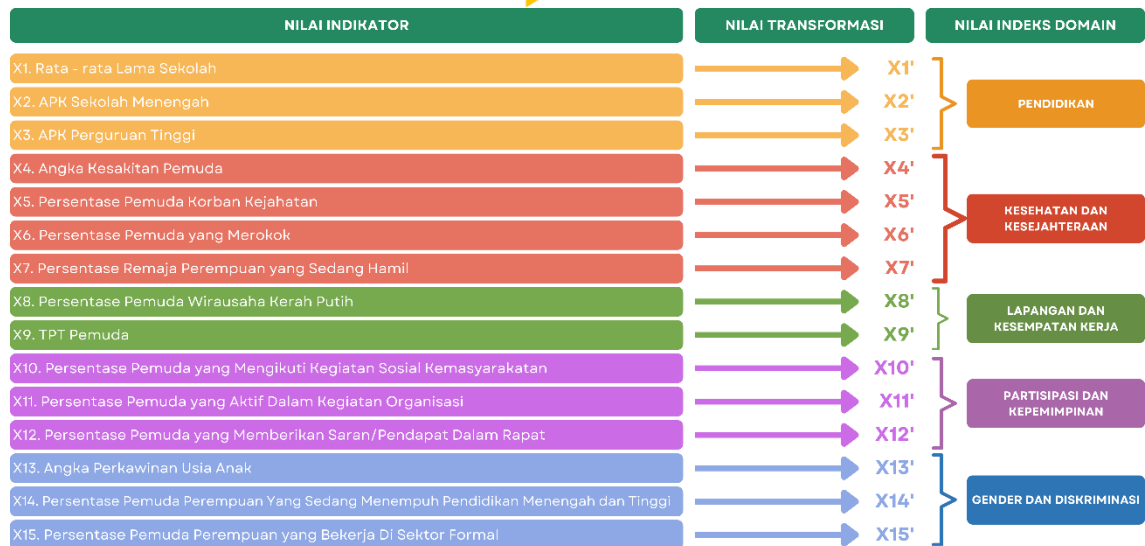
Berbagai indeks telah dikembangkan untuk berbagai tujuan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Dow Jones (keuangan), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan (Indeks Gini). Di antara semua itu, IPM merupakan indeks yang paling dikenal luas. IPM mengukur capaian rata-rata pada dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pendapatan nasional bruto per kapita). Indeks ini dihitung menggunakan rata-rata geometris dari indeks-indeks yang dinormalisasi untuk setiap dimensi tersebut.

Dalam konteks **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**, proses penyusunannya mengikuti prosedur yang serupa dengan IPM. Pengembangan IPP di Indonesia dimulai pada tahun 2016 melalui kajian pemetaan indikator yang relevan, menghasilkan 27 indikator awal dalam lima domain utama. Setelah dilakukan seleksi menggunakan analisis statistik Principal Component Analysis (PCA) dan pertimbangan teori, terpilih 15 indikator final yang hingga kini digunakan. Proses ini memastikan IPP dapat mencerminkan berbagai aspek penting pembangunan pemuda,

memberikan alat ukur yang andal untuk memantau perkembangan serta menginformasikan kebijakan terkait pemuda di Indonesia.

Tahapan berikutnya dalam perhitungan IPP meliputi penilaian (*scoring*) indikator, penghitungan indeks domain, dan penghitungan IPP secara keseluruhan. Secara umum, perhitungan IPP melalui beberapa langkah. Pertama, menghitung nilai indikator berdasarkan data dasar dan metode perhitungan yang tercantum dalam metadata. Kemudian, nilai indikator dinormalisasi menggunakan batas minimum dan maksimum indikator untuk mendapatkan nilai transformasi dalam skala desil (1-10). Nilai transformasi dari setiap domain dirata-ratakan untuk memperoleh nilai indeks domain dalam skala 1-100. Terakhir, rata-rata dari nilai indeks domain digunakan untuk menghitung nilai IPP dalam skala 1-100.





Gambar 3.8 Alur Proses Perhitungan IPP

Sumber: Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora 2021

Dalam rangka perhitungan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, tahapan perhitungan akan dilakukan dalam 3 tahapan yaitu menghitung capaian nilai indikator, capaian nilai domain, dan terakhir adalah perhitungan nilai capaian IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Berikut merupakan rincian rumus yang digunakan dalam proses perhitungan nilai capaian IPP.

Proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat positif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Skor Indikator}_{ji} = \frac{\text{nilai indikator}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$$

Sedangkan proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat negatif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Skor Indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{nilai indikator}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$$

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai indikator yang telah ditransformasikan. Dengan kata lain, nilai indikator yang awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang dikelompokkan ke dalam 10

kelompok nilai (dengan nilai terendah = 1 dan tertinggi = 10). Secara umum, jarak antara dua kelompok desil dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\Delta D = \frac{\text{batas maksimum} - \text{batas minimum}}{10}$$

Tabel 3.1 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP

Variabel		Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data
Domain pendidikan				
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
X2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
X3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan				
X4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X6	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Lapangan dan Kesempatan kerja				
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda arab Saudi
Domain Partisipasi dan kepemimpinan				
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
Domain Gender dan Diskriminasi				
X13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25	100 (target)	Standar
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Sumber: Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora 2021



Setelah mendapatkan nilai transformasi indikator, maka proses berikutnya adalah menghitung nilai indeks domain. Nilai indeks domain j dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain j lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:

$$\text{Indeks Domain}_j = \frac{NTI_1 + NTI_2 + \dots + NTI_{10}}{n}$$

n = jumlah indikator tiap domain

Dalam perhitungan nilai indeks domain, persamaan di atas menggunakan metode pembobotan yang seimbang (*equal weighting*). Hal ini karena dapat menjawab semua argumen secara etika atau moral di masa yang akan datang tentang penentuan aspek yang lebih penting untuk pembangunan pemuda.

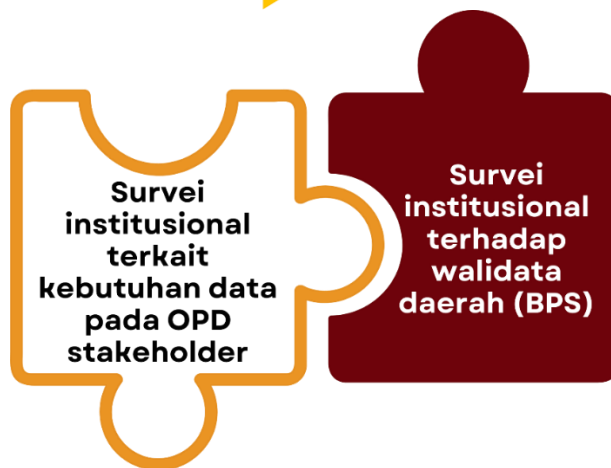
Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP berdasarkan rata rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 0-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:

$$IPP = \frac{\text{Indeks Domain}_1 + \text{Indeks Domain}_2 + \dots + \text{Indeks Domain}_5}{5}$$

Seperti pada perhitungan nilai indeks domain, perhitungan nilai IPP juga menggunakan metode pembobotan seimbang.

3.2.4 Inventarisasi Data

Untuk memenuhi standar perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang telah ditetapkan oleh Kemenpora, diperlukan proses inventarisasi data yang relevan dengan IPP. Terkait hal tersebut, pemenuhan kebutuhan data dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu:



Gambar 3.9 Tahapan Proses Pemenuhan Data Perhitungan IPP

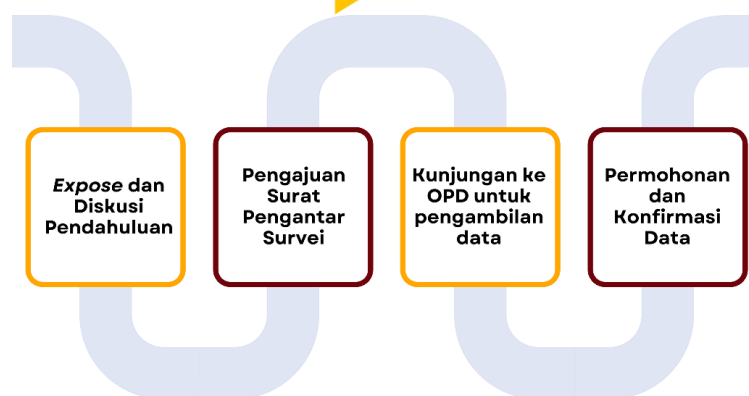
Sumber: Tim Penulis, 2024

3.2.4.1 Survei Institusional OPD Stakeholder

Sektor pembangunan dan pengembangan pemuda tidak hanya menjadi urusan dari satu OPD atau dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah saja. Diperlukan peran dari pengampu urusan lain dalam mewujudkan upaya pembangunan dan pengembangan pemuda. Contohnya pada domain pendidikan, diperlukan koordinasi strategis antara pengampu urusan pemuda dan pengampu urusan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karenanya, untuk dapat mewujudkan nilai capaian IPP Provinsi Jawa Tengah yang optimal diperlukan dukungan dari OPD yang masuk dalam stakeholder sektor kepemudaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah berupa data pada masing – masing indikator pengungkit sesuai dengan tupoksi dinas.

Pelaksanaan survei institusional permohonan data ke OPD yang menjadi stakeholder IPP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.



Gambar 3.10 Tahapan Survei Institusional OPD

Sumber: Tim Penulis, 2024

Adapun berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari pelaksanaan survei institusional data perhitungan IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Permohonan Data OPD Terkait

Variabel		Parameter Data	Sumber Data
Domain Pendidikan			
X1	Rata-rata lama sekolah pemuda	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	• Disdikbud Provinsi Jawa Tengah
X2	APK sekolah menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	
X3	APK perguruan tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan			
X4	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	• Dinkes Provinsi Jawa Tengah
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	• Polda Jawa Tengah
X6	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	• Dinkes Provinsi Jawa Tengah
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun	• Dinkes Provinsi Jawa Tengah • DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja			
X8	Persentase pemuda wirasaha kerah putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh	

Variabel		Parameter Data	Sumber Data
		tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.	Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
X9	TPT Pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16–30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja	
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan			
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	- Disporapar Provinsi Jawa Tengah - Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah - Dinsos Provinsi Jawa Tengah
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	
Domain Gender dan Diskriminasi			
X13	Angka perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	- DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah - Kemenag Provinsi Jawa Tengah
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	- Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah - DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Tim Penulis, 2024

3.2.4.2 Survei Institusional BPS

Perhitungan IPP juga memerlukan pengolahan data statistic terutama di beberapa indikator pengungkutnya. Oleh sebab itu, maka diperlukan peran dari institusi yang memiliki kapabilitas untuk melakukan

perhitungan statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam perolehan data statistik.

Berikut merupakan tahapan proses survei institusional pengambilan data IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang dilakukan di lingkup kantor BPS Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.11 Tahapan Survei Institusional BPS Provinsi

Sumber: Tim Penulis, 2024

Adapun berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari pelaksanaan survei institusional BPS guna data perhitungan IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Permohonan Data Terhadap Walidata (BPS)

No	Domain dan Indikator	Formula/Defenisi Operasional	OPD
A	Domain Pendidikan		
x1	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	BPS Provinsi Jawa Tengah
x2	APK sekolah menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	
x3	APK perguruan tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	
B	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan		
X4	Angka kesakitan pemuda	Angka Kesakitan Pemuda adalah proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	BPS Provinsi Jawa Tengah
X5	Persentase Pemuda Korban Kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun	
X6	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	
X7	Persentase remaja perempuan yang sedana hamil	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun	

No	Domain dan Indikator	Formula/Defenisi Operasional	OPD
C	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja		
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.	BPS Provinsi Jawa Tengah
X9	Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16-30 tahun	
D	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan		
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	BPS Provinsi Jawa Tengah
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	
X12	Persentase Pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	
E	Domain Gender dan Diskriminasi		
X13	Angka perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	BPS Provinsi Jawa Tengah
X14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	
X15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–30 tahun yang bekerja di sektor formal	

Sumber: Tim Penulis, 2024

3.2.5 Analisis Data

Analisis yang dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam pengukuran capaian nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini adalah analisis terhadap data capaian pada masing – masing indikator pengungkit domain IPP. Dari 5 domain Penyusun IPP, terdapat 15 indikator pengungkit yang dilakukan analisis untuk mendapatkan besaran nilai serta gambaran pembangunan pemuda di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis dan perhitungan pada masing – masing indikator ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2021. Perhitungan dilakukan mulai dari nilai capaian masing – masing indikator pengungkit per domain, hingga nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Berikut merupakan alur perhitungan IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



Gambar 3.12 Alur Perhitungan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Dokumen Pedoman Indeks Pembangunan Pemuda, Kemenpora 2021

1. Perhitungan Nilai Transformasi Indikator

Perhitungan nilai transformasi indikator pengungkit dalam setiap domain dilakukan berdasarkan pedoman meta data IPP. Selain mempertimbangkan nilai indikator itu sendiri, proses ini juga memperhitungkan batas minimum dan maksimum yang ditentukan untuk setiap indikator. Batas-batas ini mengacu pada standar resmi, seperti target rata-rata lama sekolah sebesar 15 tahun yang ditetapkan oleh PBB (setara dengan kelulusan SMA). Sementara itu, untuk indikator seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), batas nilai didasarkan pada data TPT pemuda di Arab Saudi, yang pada tahun 2015 tercatat memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, batas minimum dan maksimum digunakan untuk menentukan nilai indikator yang berkontribusi dalam penyusunan IPP. Batas maksimum atau minimum ini merepresentasikan target yang perlu dicapai agar nilai IPP mendekati angka ideal, yaitu 100. Untuk indikator dengan sifat positif (semakin tinggi nilainya semakin baik), batas maksimum menjadi acuan pencapaian nilai IPP yang optimal.

Sebaliknya, untuk indikator negatif (semakin rendah nilainya semakin baik), batas minimum menjadi target yang harus dicapai. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai indikator dinormalisasi dan distandarkan melalui transformasi skala 0 hingga 1. Skala ini menggambarkan posisi relatif setiap indikator terhadap batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Proses normalisasi ini memastikan semua indikator dapat dibandingkan secara setara, sekaligus menciptakan kerangka pengukuran yang konsisten untuk menghasilkan nilai transformasi yang akurat. Berikut contoh perhitungan nilai transformasi indikator penyusun IPP Provinsi Jawa Tengah 2024.

X8 = Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Batas min X1 = 0

Batas max X1 = 2

$$Skor\ Indikator_{x1} = \frac{1 - 0}{2 - 0} = 0,5$$

Proses ini dilanjutkan dengan mengonversi nilai indikator ke dalam bentuk desil untuk memperoleh nilai transformasi indikator. Dengan kata lain, nilai indikator yang awalnya berupa nilai kontinu diubah menjadi nilai diskrit yang terbagi ke dalam 10 kelompok, di mana kelompok terendah diberi nilai 1 dan kelompok tertinggi diberi nilai 10.

$$\Delta D = \frac{2 - 0}{10} = 0,2$$

Saat penentuan desil didasarkan pada nilai indikator, setiap desil memiliki perbedaan sebesar 0,2 poin. Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh penentuan nilai transformasi indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024.

Tabel 3.4 Nilai Transformasi Indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Nilai Indikator	Nilai Transformasi
0 - 0,2	1
0,2 - 0,4	2
0,4 - 0,6	3
0,6 - 0,8	4

Nilai Indikator	Nilai Transformasi
0,8 - 1	5
1 - 1,2	6
1,2 - 1,4	7
1,4 - 1,6	8
1,6 - 1,8	9
1,8 - 2	10

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Berikut merupakan contoh hasil perhitungan nilai transformasi indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Nilai Transformasi Indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Transformasi
X8	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	0	2	1	5

Sumber: Tim Penyusun, 2024

2. Perhitungan Nilai Indeks Domain

Setelah nilai transformasi indikator diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks domain. Untuk menghitung indeks domain pendidikan, rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain pendidikan dihitung, kemudian dikalikan dengan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain dalam rentang 0-100. Berikut adalah contoh hasil perhitungan nilai domain lapangan dan kesempatan kerja pada Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2024.

$$\text{Skor Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja} = \frac{5 + 7}{2}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai domain lapangan dan kesempatan kerja Provinsi Jawa Tengah 2024 sebesar 60.

3. Perhitungan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP dengan mengambil rata-rata dari semua nilai indeks domain, yang menghasilkan nilai IPP dalam rentang 0-100. Berikut adalah contoh perhitungan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah 2024.

$$IPP\ 2024 = \frac{D1 + D2 + D3 + D4 + D5}{5}$$

3.2.6 Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap ini merangkum penilaian terhadap 5 domain dan 15 indikator yang membentuk IPP Provinsi Jawa Tengah. Pada bagian kesimpulan dan rekomendasi, setiap domain dan indikator akan dianalisis lebih mendalam secara objektif, mencakup aspek-aspek yang belum tercapai serta aspek-aspek yang sudah memenuhi kriteria dengan baik. Berdasarkan analisis ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat merencanakan program-program untuk meningkatkan nilai pada masing-masing domain yang telah dinilai.



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

BAB 4

CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA PROVINSI JAWA TENGAH 2024

**NASKAH
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
PROVINSI JAWA TENGAH 2024**



4.1 DOMAIN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan elemen fundamental yang mencerminkan kemampuan dan potensi pemuda dalam mengakses serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Lebih dari sekadar proses transfer pengetahuan, pendidikan berkualitas menjadi landasan penting untuk membangun karakter, kemampuan berpikir kritis, dan daya saing generasi muda di tengah persaingan global. Akses terhadap pendidikan menjadi salah satu indikator utama dalam domain ini, mencakup ketersediaan lembaga pendidikan dan kesetaraan akses bagi semua pemuda, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh pemuda memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan yang memadai.

Selain akses, kualitas pendidikan memegang peran vital. Aspek-aspek seperti kompetensi pengajar, relevansi kurikulum, dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat memengaruhi hasil belajar. Pendidikan berkualitas tidak hanya mempersiapkan pemuda untuk bersaing di dunia kerja, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Tingkat penyelesaian pendidikan, yang mencakup proporsi pemuda yang menuntaskan jenjang menengah atau tinggi, juga menjadi indikator penting. Angka kelulusan yang tinggi mencerminkan efektivitas sistem pendidikan dan prospek pemuda dalam memasuki pasar kerja.

Dengan demikian, domain pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tidak hanya menggambarkan kondisi pendidikan saat ini, tetapi juga menyoroti potensi pemuda sebagai motor penggerak perubahan. Investasi strategis dalam pendidikan memberikan dampak jangka panjang, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pemuda tetapi juga mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

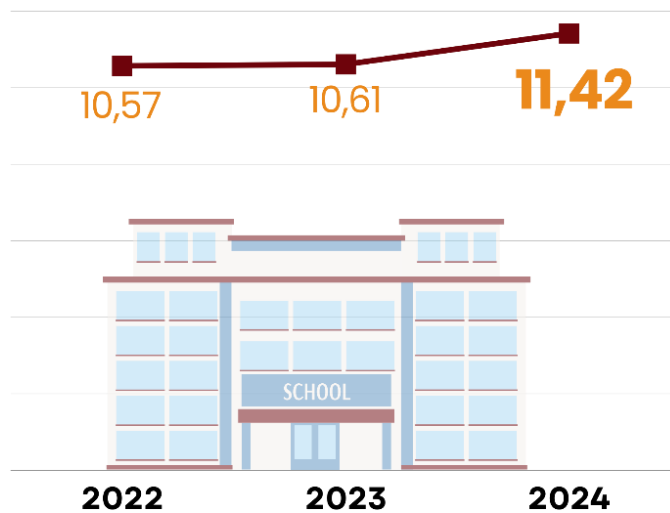


4.1.1 Rata-rata Lama Sekolah Pemuda

Rata-rata lama sekolah pemuda merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat pendidikan yang telah berhasil dicapai oleh kelompok usia muda dalam suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pemuda dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang pemuda untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sosial. Di tingkat global, target rata-rata lama sekolah yang ideal sering dikaitkan dengan pencapaian jenjang pendidikan menengah atas, yaitu sekitar 12 hingga 15 tahun pendidikan. Pencapaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam menciptakan generasi muda yang lebih kompeten dan berdaya saing.

Namun, rata-rata lama sekolah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil. Dalam banyak kasus, kelompok pemuda dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di daerah perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan rata-rata lama sekolah tidak hanya membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, negara dapat memastikan bahwa semua pemuda memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Berikut adalah data capaian RLS Pemuda di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



Gambar 4.1 Capaian Rata – rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, menandakan peningkatan akses pendidikan dan keberhasilan program-program pendidikan. Data mencatat bahwa pada tahun 2022, RLS mencapai angka 10,57. Angka ini mencerminkan capaian yang stabil, namun masih memberikan ruang untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan rata-rata durasi pendidikan yang ditempuh masyarakat.

Pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, di mana nilai RLS meningkat menjadi 10,61. Meski kenaikannya terlihat kecil secara angka, hal ini menunjukkan langkah awal yang penting dalam perbaikan kualitas pendidikan. Berbagai inisiatif, seperti program penyetaraan pendidikan, peningkatan fasilitas belajar, dan pemberian dukungan kepada kelompok rentan, menjadi faktor yang mendorong capaian ini. Peningkatan ini juga menjadi sinyal positif bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan sebagai modal utama untuk meningkatkan taraf hidup.

Tren positif terus berlanjut pada tahun 2024, di mana RLS berhasil mencapai angka 11,42. Lonjakan ini mengindikasikan dampak nyata dari investasi pemerintah dan pemangku kebijakan di sektor pendidikan, baik dalam bentuk infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, maupun program kesetaraan akses pendidikan di daerah terpencil.



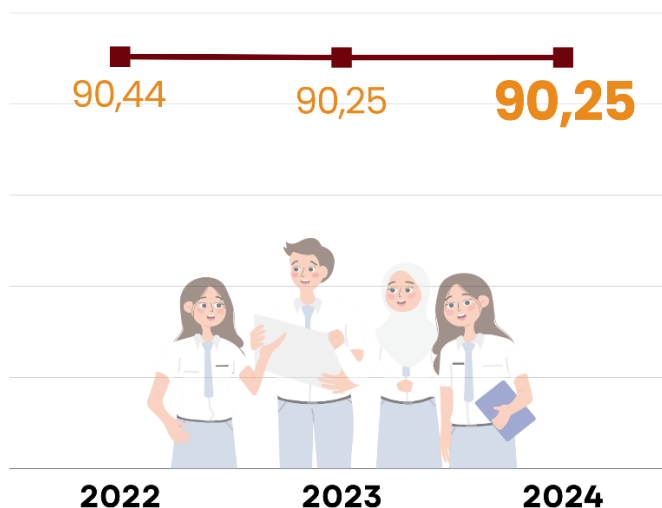
Peningkatan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dengan masyarakat yang semakin terdidik dan siap menghadapi tantangan global.

4.1.2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang sekolah menengah merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang terdaftar di pendidikan menengah, baik di SMP, SMA, maupun SMK. Peningkatan nilai APK sekolah menengah mencerminkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak untuk melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. APK yang tinggi menjadi tanda positif, menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Sebaliknya, APK yang rendah mengindikasikan adanya kendala, seperti masalah ekonomi, kondisi geografis, atau hambatan sosial yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah.

Uniknya, nilai APK dapat melebihi 100 persen. Hal ini terjadi karena siswa yang terdaftar di jenjang tertentu tidak selalu berasal dari kelompok usia yang sesuai. Beberapa di antaranya mungkin termasuk siswa yang lebih muda, siswa yang terlambat masuk sekolah, atau siswa yang mengulang kelas. Dengan demikian, nilai APK memberikan gambaran luas mengenai partisipasi pendidikan di jenjang tertentu, meskipun tidak selalu mencerminkan proporsi ideal dari kelompok usia yang ditargetkan.

Dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan pemuda, dihitung capaian dari APK Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Adapun capaian APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut.



Gambar 4.2 Capaian APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan yang perlu mendapat perhatian serius selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, capaian APK tercatat sebesar 90,44, yang meskipun tergolong tinggi, sudah menunjukkan tantangan dalam mempertahankan akses pendidikan menengah. Sayangnya, pada tahun 2023, angka ini mengalami penurunan menjadi 90,25, mencerminkan adanya hambatan yang mungkin berkaitan dengan aksesibilitas, motivasi siswa, atau faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan.

Stagnasi lebih lanjut terlihat pada tahun 2024, di mana capaian APK tetap berada di angka 90,25. Ketidakmampuan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan program pendidikan di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti pemerataan fasilitas pendidikan, kualitas pengajaran, serta dukungan bagi kelompok masyarakat kurang mampu atau daerah terpencil menjadi isu yang harus ditangani untuk meningkatkan APK. Penurunan dan stagnasi ini juga bisa mencerminkan tantangan dalam menjaga siswa tetap berada di jalur pendidikan, baik karena *dropout* maupun pergeseran prioritas masyarakat.

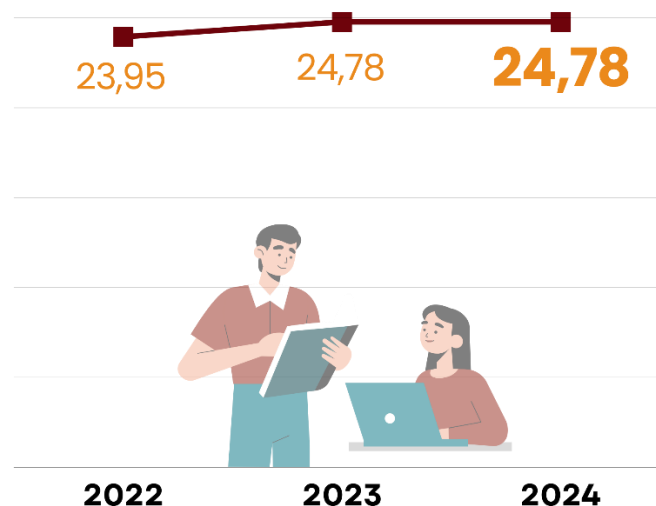
Melihat situasi ini, diperlukan langkah strategis untuk membalikkan tren ini, seperti penguatan program beasiswa, pengembangan sekolah

inklusif di daerah terpencil, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan menengah. Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih mendukung. Meskipun angka APK masih berada di level yang cukup baik, stagnasi ini menjadi sinyal penting untuk segera melakukan intervensi demi memastikan generasi muda di Jawa Tengah memiliki akses yang adil dan merata ke jenjang pendidikan menengah.

4.1.3 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi adalah indikator yang menggambarkan persentase lulusan sekolah menengah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, seperti universitas, politeknik, atau akademi. APK perguruan tinggi yang tinggi menunjukkan semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan lanjutan. Hal ini menjadi aspek krusial dalam upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berikut merupakan capaian nilai APK Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Tengah pada 2022 – 2024.



Gambar 4.3 Capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah mencerminkan dinamika perkembangan akses pendidikan



tinggi selama periode 2022-2024. Pada tahun 2022, nilai APK tercatat sebesar 23,95, menunjukkan awal yang cukup stabil dalam memberikan kesempatan bagi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023, mencapai 24,78. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya positif, baik dari pemerintah maupun lembaga pendidikan, dalam mendorong masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

Namun, peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2024, dimana nilai APK tetap berada di angka 24,78, menandakan stagnasi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan yang menghambat pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi lebih lanjut. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi stagnasi ini meliputi keterbatasan ekonomi, akses ke perguruan tinggi di daerah tertentu, atau rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Selain itu, daya tampung perguruan tinggi dan kompetisi dalam seleksi masuk juga bisa menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Untuk mengatasi stagnasi ini, langkah strategis perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Pemerintah dapat mengembangkan program beasiswa yang lebih luas, memperkuat infrastruktur pendidikan tinggi di wilayah terpencil, serta meningkatkan kesadaran akan manfaat pendidikan lanjutan. Di samping itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan industri untuk menyediakan pendidikan berbasis vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan upaya yang konsisten, diharapkan angka APK perguruan tinggi dapat terus meningkat, mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Provinsi Jawa Tengah.

4.1.4 Capaian Nilai Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

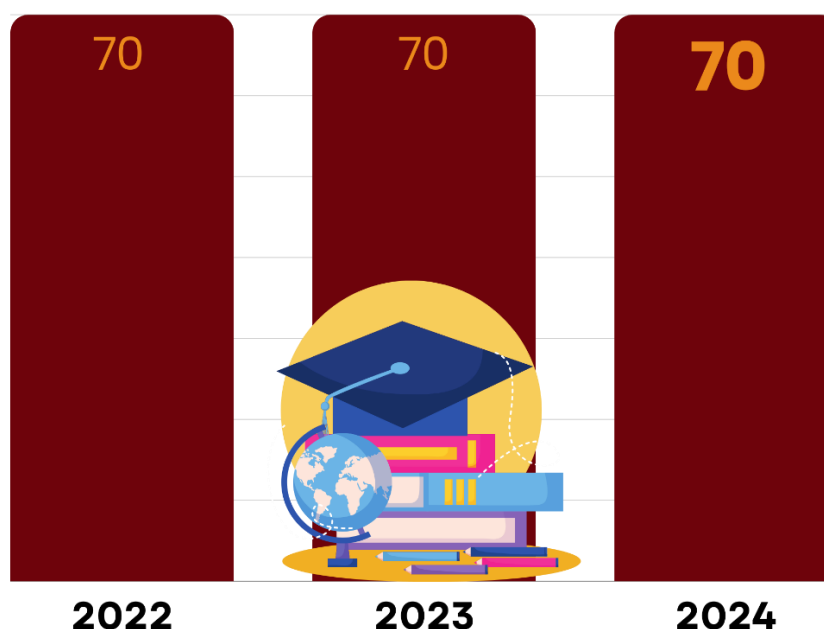
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian metodologi bahwa angka capaian domain merupakan hasil perhitungan dari semua indikator pengungkitnya. Berikut merupakan hasil perhitungan capaian nilai domain pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Nilai Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X1	Rata-rata lama sekolah	0	15	11,42	70
X2	APK sekolah menengah	0	100	90,25	
X3	APK perguruan tinggi	0	100	24,78	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan untuk setiap indikator yang menjadi faktor pengungkit dalam Domain Pendidikan, nilai domain ini tercatat mencapai **70** pada tahun 2024.



Gambar 4.4 Capaian Domain Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Capaian nilai Domain Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan kondisi stagnan dengan nilai tetap berada di angka 70. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, hasil yang dicapai belum mampu mencerminkan adanya perubahan signifikan. Stagnansi ini menjadi catatan penting bagi pihak terkait untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dijalankan dalam sektor pendidikan di provinsi ini.



Berbagai faktor bisa menjadi penyebab stagnansi nilai Domain Pendidikan. Salah satunya adalah tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, masalah seperti kesenjangan kualitas tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kendala ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat turut berkontribusi terhadap sulitnya meningkatkan capaian indikator pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan, baik dalam aspek kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan.

Untuk keluar dari kondisi stagnan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat fokus pada program peningkatan kualitas guru, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, serta penguatan dukungan finansial bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dengan upaya bersama, nilai Domain Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang, mencerminkan kemajuan nyata dalam sektor pendidikan.

4.2 DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Domain kesehatan dan kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan elemen krusial yang mencerminkan kondisi fisik, mental, dan kualitas hidup pemuda di suatu wilayah. Kesehatan yang prima menjadi fondasi penting bagi pemuda untuk berkembang secara maksimal, baik dalam bidang pendidikan, partisipasi sosial, maupun produktivitas di dunia kerja. Oleh karena itu, perhatian pada aspek kesehatan merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi yang unggul.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan itu sendiri, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai sektor lain. Salah satu cara untuk mencapai visi ini adalah melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah diakses oleh semua lapisan



masyarakat. Kesehatan, baik fisik maupun mental, harus menjadi perhatian sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan moral untuk membentuk kepribadian yang kuat, serta pemenuhan kebutuhan gizi agar pemuda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan produktif.

Dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pembangunan kesehatan, terutama dari kalangan pemuda yang memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa. Pemuda harus aktif terlibat dalam menyelesaikan berbagai tantangan kesehatan, sekaligus mempraktikkan pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kontribusi yang dapat diberikan mencakup partisipasi dalam program-program kesehatan masyarakat, menyuarakan pentingnya kesehatan mental, dan menjalankan gaya hidup sehat yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi lainnya. Dengan demikian, pemuda Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa melalui kesehatan yang lebih baik.

Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Kesehatan dan Kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

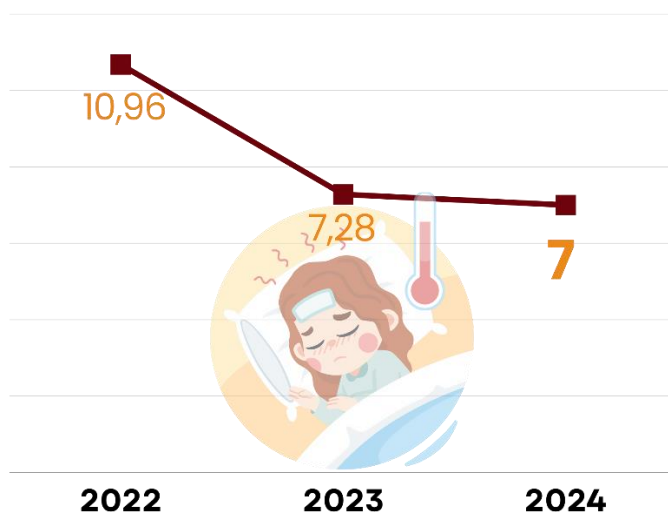
4.2.1 Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pada pemuda merujuk pada persentase pemuda yang mengalami gangguan kesehatan yang menghambat aktivitas harian mereka. Gangguan ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti bekerja, belajar, mengelola rumah tangga, atau aktivitas lain yang merupakan bagian dari rutinitas mereka. Kondisi kesehatan yang buruk, ditambah dengan daya tahan tubuh yang rendah, berpotensi menjadi hambatan serius bagi pemuda dalam menjalani peran dan tanggung jawabnya.

Masalah kesehatan yang dialami pemuda tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada produktivitas kolektif di berbagai sektor. Ketika pemuda kehilangan kemampuan untuk berkontribusi secara optimal, baik di dunia kerja, pendidikan, maupun masyarakat, hal ini dapat mengurangi tingkat produktivitas secara keseluruhan. Penurunan

produktivitas tersebut berisiko memengaruhi perekonomian, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat kemajuan pembangunan.

Berikut adalah data capaian Angka Kesakitan Pemuda Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022-2024.



Gambar 4.5 Capaian Angka Kesakitan Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Angka Kesakitan Pemuda di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan yang positif dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, angka ini tercatat sebesar 10,96, yang menandakan adanya tingkat kesakitan yang cukup tinggi di kalangan pemuda. Namun, penurunan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023, di mana angka kesakitan menurun menjadi 7,28. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan pemuda, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan akses yang lebih baik terhadap layanan medis.

Pada tahun 2024, capaian angka kesakitan kembali mengalami penurunan, bahkan lebih rendah lagi, mencapai angka 7. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah mulai menunjukkan hasil yang positif. Program kesehatan masyarakat yang lebih terjangkau dan efektif, peningkatan akses ke layanan kesehatan preventif, serta upaya promotif di komunitas mungkin telah berkontribusi pada perbaikan ini. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan pemuda tentang pentingnya menjaga kesehatan, seperti



mengadopsi pola makan sehat dan gaya hidup aktif, juga memainkan peran penting dalam menurunkan angka kesakitan.

Penurunan angka kesakitan ini tentunya harus diikuti dengan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatan pemuda di Provinsi Jawa Tengah. Fokus utama harus pada pencegahan penyakit, baik fisik maupun mental, melalui program-program pendidikan kesehatan yang lebih intensif. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan pemuda memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan langkah-langkah yang terus diperkuat, diharapkan angka kesakitan akan terus menurun, memungkinkan generasi muda untuk tumbuh sehat dan produktif, yang pada gilirannya mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

4.2.2 Persentase Pemuda Korban Kejahatan

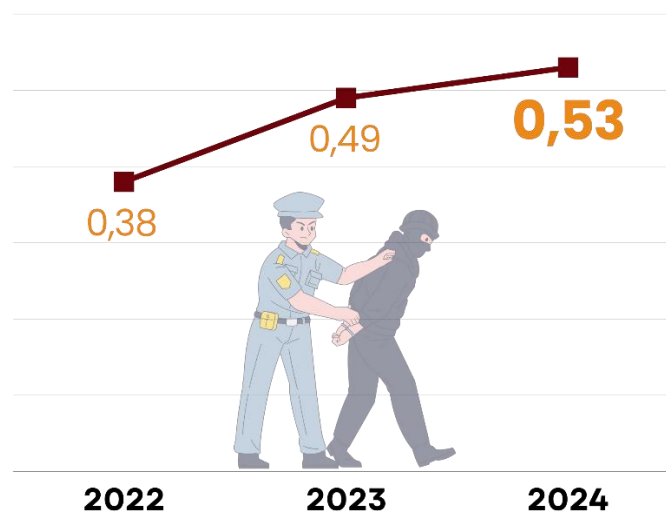
Persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan merupakan masalah penting yang harus mendapat perhatian serius dalam konteks keamanan dan perlindungan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pemuda seringkali menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan, seperti kekerasan fisik, penipuan, dan kejahatan siber. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, ketidakmampuan dalam menghindari situasi berisiko, serta paparan terhadap lingkungan yang tidak aman, berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan yang menimpa mereka. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga memengaruhi komunitas secara luas, yang berujung pada menurunnya rasa aman dan kualitas hidup pemuda secara keseluruhan.

Kondisi ini memberikan dasar penting bagi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi pemuda. Data tentang persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan dapat membantu mengidentifikasi daerah-daerah rawan, jenis kejahatan yang paling sering terjadi, serta kelompok pemuda yang lebih rentan. Dari informasi ini, langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat

dirancang, termasuk peningkatan pendidikan kesadaran hukum, penguatan sistem perlindungan hukum, dan pemberian dukungan yang lebih baik bagi para korban. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk menilai kualitas intervensi sosial yang dilakukan, pola pemantauan kejahatan, serta peran aktif pemuda dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Penurunan angka persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan keamanan dan perlindungan sosial. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran hukum, efektivitas kebijakan intervensi sosial dan hukum, serta keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pemuda. Dengan langkah-langkah yang terarah, diharapkan pemuda dapat terhindar dari berbagai ancaman kejahatan, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya komunitas yang lebih harmonis dan produktif.

Berikut adalah data capaian persentase pemuda korban kejahatan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022-2024.



Gambar 4.6 Capaian Persentase Pemuda Korban Kejahatan Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2022, angka ini tercatat sebesar 0,38, yang menggambarkan tingkat kejahatan yang relatif rendah terhadap pemuda. Namun, pada tahun berikutnya, 2023, angka tersebut naik menjadi 0,49, menunjukkan adanya peningkatan kasus yang signifikan. Lonjakan ini



menandakan bahwa pemuda di provinsi tersebut mulai semakin rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, yang tentunya memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2024, persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan kembali mengalami kenaikan dan mencapai angka 0,53. Peningkatan yang terus-menerus ini menunjukkan bahwa pemuda di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi kelompok yang rentan terhadap kejahatan, meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ini. Faktor-faktor seperti peningkatan angka kejahatan siber, kekerasan fisik, dan penipuan yang menargetkan pemuda mungkin turut berperan dalam peningkatan angka tersebut. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran di kalangan pemuda tentang potensi bahaya atau kekurangmampuan mereka dalam melindungi diri dari ancaman yang ada.

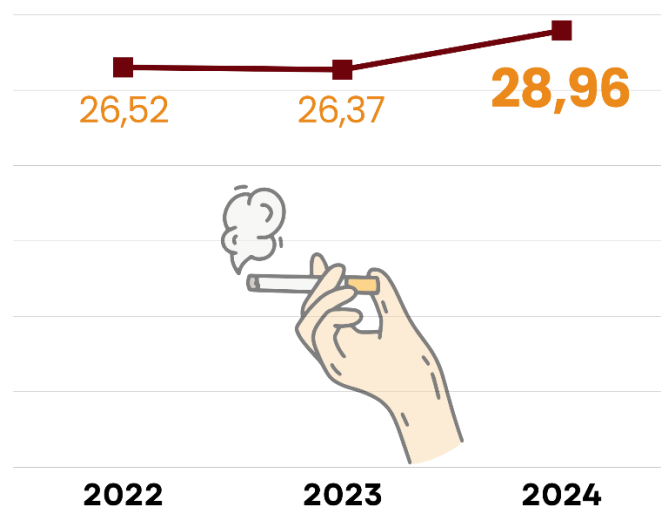
Untuk mengatasi fenomena ini, langkah-langkah preventif yang lebih efektif harus diterapkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi kepada pemuda mengenai hak-hak mereka, serta cara-cara melindungi diri dari potensi kejahatan. Program-program kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan yang melibatkan komunitas juga dapat membantu mengurangi angka korban di kalangan pemuda. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pemuda. Melalui upaya yang terkoordinasi, diharapkan angka korban kejahatan di kalangan pemuda dapat menurun dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

4.2.3 Persentase Pemuda yang Merokok

Merokok adalah kegiatan yang melibatkan pembakaran tembakau dan penghisapan asapnya, baik melalui rokok maupun pipa. Secara umum, terdapat dua cara merokok: pertama, menghisap asap hingga masuk ke paru-paru sebelum mengeluarkannya, dan kedua, hanya menghisap asap sampai ke mulut sebelum dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Persentase pemuda yang merokok menjadi perhatian utama dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), karena dampak negatifnya terhadap

kesehatan dan kualitas hidup generasi muda. Data menunjukkan peningkatan prevalensi merokok di kalangan remaja, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kemudahan akses terhadap produk tembakau, dan minimnya edukasi tentang bahaya merokok. Kebiasaan ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik, seperti memicu penyakit paru-paru dan kanker, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental, menurunkan kesejahteraan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan beban sistem kesehatan.

Berikut merupakan capaian angka persentase pemuda yang merokok di Provinsi Jawa Tengah pada 2022 – 2024.



Gambar 4.7 Capaian Persentase Pemuda yang Merokok Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024
Sumber: Tim Penyusun, 2024

Tren merokok di kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dengan kecenderungan peningkatan pada tahun 2024. Pada tahun 2022, persentase pemuda yang merokok tercatat sebesar 26,52%, mengindikasikan tantangan yang signifikan dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 26,37%, hal ini tidak cukup untuk menunjukkan perbaikan yang signifikan, mengingat angka tersebut kembali melonjak pada tahun 2024 menjadi 28,96%. Peningkatan ini mencerminkan adanya dinamika kompleks yang memengaruhi perilaku merokok di kalangan generasi muda.



Fluktuasi angka tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas produk tembakau, pengaruh lingkungan sosial, dan efektivitas kebijakan pengendalian tembakau di tingkat daerah. Di sisi lain, meskipun telah dilakukan berbagai kampanye edukasi mengenai bahaya merokok, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan aturan tentang iklan rokok di media massa turut berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi ini. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam menekan angka perokok muda.

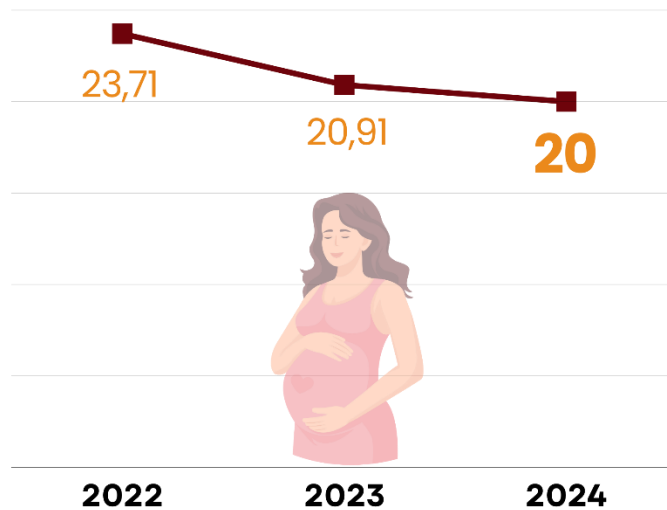
Peningkatan persentase perokok muda di Jawa Tengah, khususnya pada tahun 2024, membawa dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas pembangunan pemuda. Selain meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan, fenomena ini juga dapat menghambat produktivitas generasi muda dan menambah beban ekonomi akibat meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintensifkan kebijakan preventif melalui penguatan regulasi, pengendalian distribusi produk tembakau, serta peningkatan pendidikan kesehatan di sekolah. Upaya ini perlu disertai dengan dukungan aktif dari komunitas lokal dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat.

4.2.4 Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil

Persentase remaja perempuan yang hamil menjadi salah satu isu penting dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), karena memiliki dampak besar terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Data menunjukkan bahwa kehamilan di kalangan remaja perempuan masih menjadi perhatian utama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses terhadap edukasi mengenai kesehatan reproduksi, rendahnya pemahaman tentang seksualitas, dan norma sosial yang sering kali mengesampingkan isu ini. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius, termasuk risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, serta kendala dalam melanjutkan pendidikan, sehingga

menghambat remaja perempuan mencapai potensi terbaik mereka di masa depan.

Berikut merupakan capaian angka persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Provinsi Jawa Tengah pada 2022 – 2024.



Gambar 4.8 Capaian Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Dalam periode 2022 hingga 2024, Provinsi Jawa Tengah mencatat tren penurunan yang menggembirakan dalam indikator Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil. Pada tahun 2022, angka ini tercatat sebesar 23,71%, menunjukkan bahwa isu kehamilan remaja masih menjadi tantangan signifikan. Namun, upaya berbagai pihak mulai membuahkan hasil, terlihat dari penurunan angka ini menjadi 20% pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani masalah ini, sekaligus memberi harapan terhadap peningkatan kualitas hidup generasi muda di provinsi tersebut.

Penurunan angka kehamilan remaja di Jawa Tengah kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti peningkatan akses terhadap edukasi kesehatan reproduksi, kampanye kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga, serta penguatan peran sekolah dan komunitas dalam memberikan informasi terkait seksualitas. Selain itu, intervensi dari pemerintah daerah melalui program-program seperti layanan kesehatan ramah remaja dan pemberdayaan perempuan juga turut

berperan dalam mendorong perubahan positif ini. Meski begitu, tantangan seperti norma budaya yang konservatif dan stigma sosial terhadap diskusi seksualitas masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan tren penurunan ini.

Penurunan persentase remaja perempuan yang hamil membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan pemuda di Jawa Tengah. Dengan berkurangnya angka kehamilan remaja, peluang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan meraih potensi penuh mereka menjadi lebih besar. Meski demikian, upaya ini perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti integrasi pendidikan seks dalam kurikulum sekolah, peningkatan akses terhadap kontrasepsi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung dialog terbuka tentang kesehatan reproduksi menjadi kunci untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian ini di masa mendatang.

4.2.5 Capaian Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berikut merupakan hasil perhitungan capaian nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Pemuda berdasarkan hasil perhitungan capaian pada 4 indikator pengungkitnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

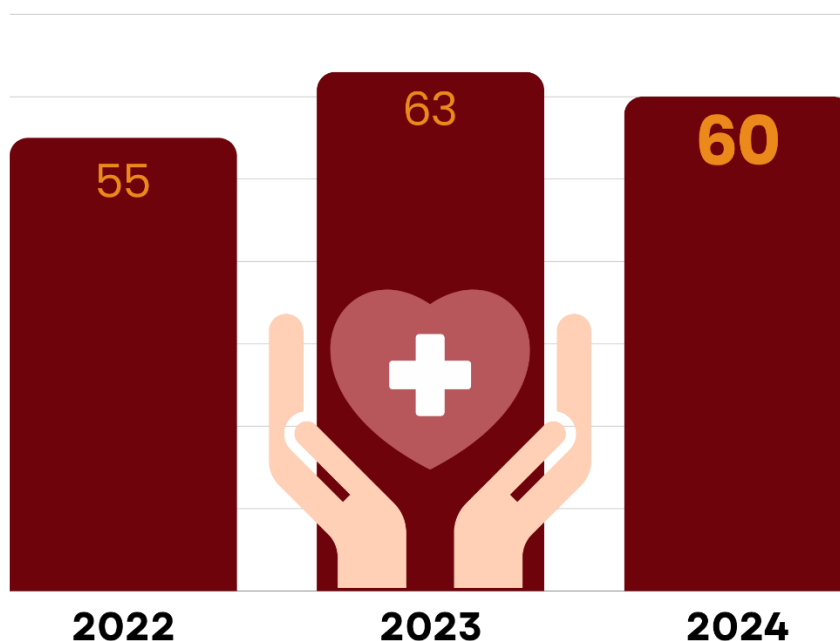
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X4	Angka kesakitan pemuda	0	20	7	60
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,53	
X6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	28,96	

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	20	

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada tahun 2024, capaian domain Kesehatan dan Kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 60. Pencapaian ini menunjukkan adanya dinamika dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. Jika ditelusuri lebih lanjut, tren fluktuasi terlihat cukup jelas dalam tiga tahun terakhir, mengindikasikan bahwa hasil yang dicapai dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi kualitas program kesehatan dan kesejahteraan di provinsi tersebut.



Gambar 4.9 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada tahun 2022, nilai domain Kesehatan dan Kesejahteraan tercatat sebesar 55, angka yang menunjukkan tantangan besar dalam memastikan akses terhadap layanan kesehatan serta peningkatan kualitas hidup pemuda. Namun, upaya yang lebih intensif, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, kampanye hidup sehat, dan layanan yang ramah pemuda, berhasil mendorong peningkatan nilai menjadi 63 pada tahun 2023.



Sayangnya, pencapaian ini tidak dapat dipertahankan, karena pada tahun 2024 angka tersebut menurun menjadi 60. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dijalankan.

Fluktuasi nilai ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keberlanjutan program kesehatan, alokasi anggaran yang memadai, dan kemampuan pengelolaan layanan kesehatan. Sementara itu, faktor eksternal seperti perubahan kondisi sosial-ekonomi, dampak pandemi, dan tantangan geografis dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah terpencil juga dapat memengaruhi hasil yang dicapai. Selain itu, kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya kesehatan dan kesejahteraan menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.

Melihat tren capaian ini, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi dan keberlanjutan dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pemuda. Evaluasi menyeluruh terhadap program yang ada, disertai penyesuaian strategi untuk mengatasi hambatan, menjadi langkah kunci untuk memastikan pencapaian yang lebih stabil dan optimal di masa depan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, institusi pendidikan, dan sektor swasta, dapat memperkuat program yang dirancang. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan nilai domain Kesehatan dan Kesejahteraan di masa mendatang tidak hanya stabil, tetapi juga terus meningkat, memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi muda di Jawa Tengah.

4.3 DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA

Posisi dan peran tenaga kerja menjadi elemen kunci dalam pembangunan, tidak hanya sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sasaran utama dari berbagai upaya pembangunan. Tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mencakup kesejahteraan material dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua tenaga kerja.

Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas utama dalam pembangunan ketenagakerjaan. Tenaga kerja yang kompeten tidak hanya mampu bersaing di pasar global, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional. Salah satu strategi pembangunan ketenagakerjaan adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pemuda memiliki peran strategis sebagai bagian populasi yang sedang berada pada fase penting, terutama saat mulai memasuki dunia kerja. Dengan energi, inovasi, dan semangat yang dimiliki, pemuda memiliki potensi besar untuk mendorong produksi barang dan jasa baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat luas. Namun, optimalisasi potensi ini membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat.

Kebijakan khusus untuk tenaga kerja pemuda sangat diperlukan, salah satunya melalui penyelenggaraan pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan industri terkini. Pelatihan ini harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, perluasan peluang kerja untuk pemuda, termasuk pengembangan wirausaha muda inovatif, juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dan sektor swasta perlu menciptakan iklim bisnis yang kondusif serta menyediakan akses ke modal dan teknologi.

Penempatan tenaga kerja pemuda di sektor-sektor strategis juga menjadi fokus penting. Sektor seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan industri kreatif sangat sesuai dengan karakter pemuda yang dinamis dan inovatif. Dengan menempatkan pemuda di sektor ini, pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan inklusif, sekaligus memberi mereka ruang untuk berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tenaga kerja pemuda bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Untuk dapat mengidentifikasi mengenai gambaran sektor tenaga kerja dan lapangan kerja pemuda Provinsi Jawa Tengah, berikut adalah hasil



perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

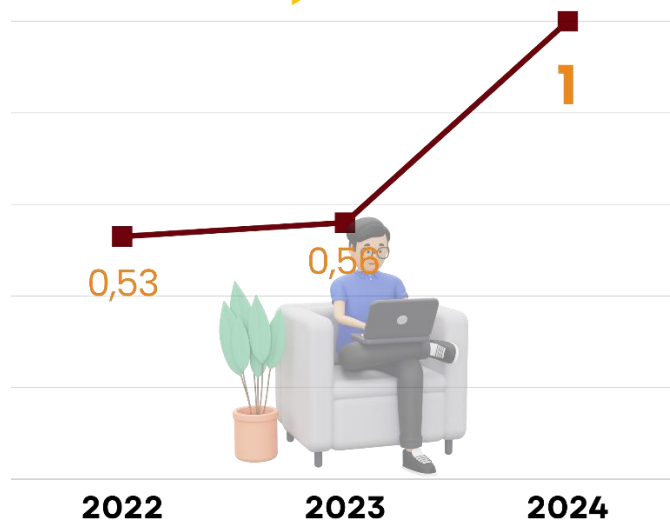
4.3.1 Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Pemuda wirausaha kerah putih merujuk pada generasi muda yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha secara mandiri, mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi dan taraf hidup yang baik. Mereka biasanya bergerak di bidang-bidang seperti profesional atau teknisi, kepemimpinan atau manajemen, serta tenaga administrasi. Dalam menjalankan usaha, pemuda ini dapat melibatkan tenaga kerja tetap maupun tidak tetap, tergantung pada skala dan kebutuhan bisnis yang dikelola.

Pengembangan wirausaha kerah putih tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan memberikan dampak sosial yang lebih luas. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong kewirausahaan sosial, yaitu jenis usaha yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal. Dengan pendekatan ini, wirausaha pemuda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga memberdayakan komunitas yang membutuhkan.

Keterlibatan pemuda dalam usaha mandiri memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Usaha mandiri memungkinkan pemuda untuk mengasah berbagai keterampilan praktis seperti problem solving, inovasi, serta pengambilan keputusan. Selain itu, aktivitas ini memberikan peluang untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan, manajerial, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Guna menggambarkan kondisi pemuda wirausaha kerah putih di Provinsi Jawa Tengah, berikut merupakan capaian indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih pada tahun 2022 – 2024.



Gambar 4.10 Capaian Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Pada periode 2022–2024, indikator Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, angka capaian tercatat sebesar 0,53%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,56% pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan angka capaian mencapai 1%. Lonjakan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah pemuda yang terlibat dalam wirausaha berbasis profesionalitas, manajerial, dan administrasi.

Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai program yang mendukung pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda, seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi akses modal, serta pengembangan ekosistem bisnis yang inklusif di Jawa Tengah. Program-program tersebut memberikan dukungan signifikan dalam membangun kapasitas pemuda untuk mengelola usaha secara mandiri dan kompetitif. Selain itu, kesadaran pemuda akan peluang di sektor kerah putih, didukung oleh akses informasi dan teknologi yang semakin luas, turut mempercepat peningkatan angka wirausaha muda di provinsi ini.

Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu pemuda dalam meraih kemandirian ekonomi, tetapi juga menjadi indikator positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Dengan meningkatnya jumlah pemuda yang menjalankan usaha kerah putih, kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat



menjadi semakin nyata. Momentum pertumbuhan ini perlu terus dijaga melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperluas peluang dan akses yang lebih besar bagi pemuda yang ingin berwirausaha di masa mendatang.

4.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

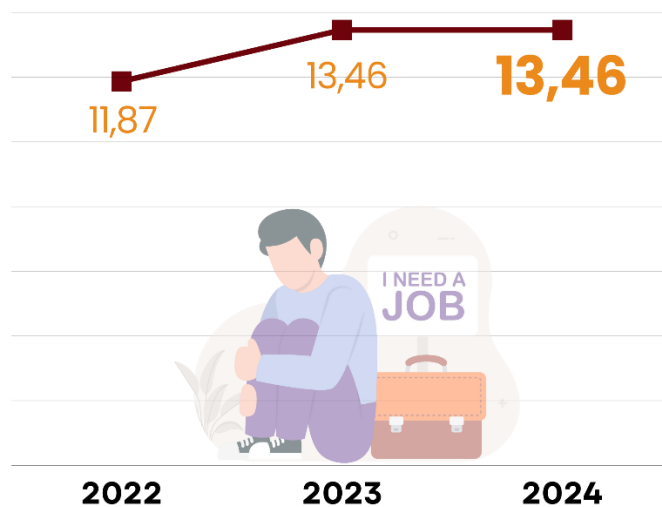
Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja, yaitu jumlah individu yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh kesempatan bekerja. Tingkat ini menjadi barometer kesehatan ekonomi suatu daerah atau negara, karena tingginya pengangguran sering kali menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, minimnya investasi, serta ketidakselarasan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri merupakan penyebab utama tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka (open unemployment) mencakup penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Selain itu, kelompok ini juga mencakup individu yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dalam analisis lebih lanjut, kategori ini sering mencerminkan masalah struktural di pasar tenaga kerja, seperti kurangnya akses terhadap pelatihan yang relevan atau keterbatasan informasi terkait peluang kerja.

Dalam konteks pemuda, tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan pasar kerja, dan persaingan yang ketat di sektor formal. Pemuda yang baru lulus pendidikan formal sering kali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga banyak yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan rendah. Kondisi ini tidak hanya menghambat perkembangan individu, tetapi juga membatasi kontribusi

mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan strategis seperti peningkatan akses terhadap pelatihan kerja, pengembangan wirausaha pemuda, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan.

Berikut merupakan capaian indikator TPT Pemuda di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 – 2024.



Gambar 4.11 Capaian TPT Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Selama tiga tahun terakhir, nilai capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang cukup mencolok. Pada tahun 2022, TPT Pemuda tercatat sebesar 11,87%, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 13,46% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut tidak menunjukkan perubahan, tetap berada di tingkat 13,46%. Tren ini menggambarkan adanya tantangan dalam menyerap tenaga kerja muda ke pasar kerja, meskipun berbagai upaya mungkin telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran di kalangan pemuda.

Peningkatan TPT Pemuda ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksesuaian antara keterampilan pemuda dengan kebutuhan pasar kerja, pertumbuhan lapangan kerja yang belum mampu mengimbangi jumlah pencari kerja, serta dampak ekonomi global yang memengaruhi investasi dan sektor produktif. Stagnasi angka pada tahun

2024 menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan program ketenagakerjaan yang ada. Misalnya, program pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan industri modern, sehingga pemuda memiliki peluang lebih besar untuk terserap di sektor formal.

Selain itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain perlu memperkuat sinergi untuk mendorong kewirausahaan pemuda sebagai alternatif solusi. Langkah ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan teknologi dan pemasaran. Dengan memberikan dorongan yang lebih kuat pada sektor ini, pemuda tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi komunitas mereka. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan pengangguran secara struktural, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

4.3.3 Capaian Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Domain lapangan dan kesempatan kerja terdiri dari dua indikator utama, yaitu:

- 1. Pemuda Wirausaha Kerah Putih
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

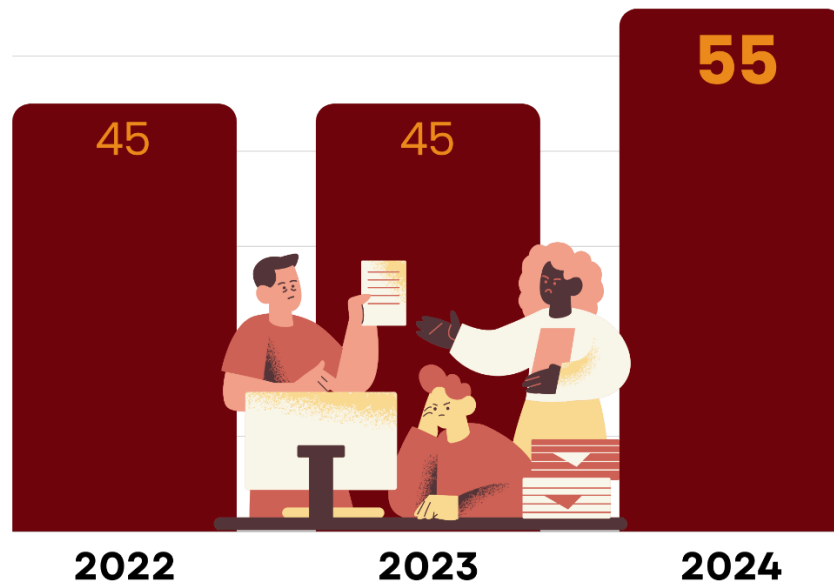
Berdasarkan hasil perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai capaian untuk domain lapangan dan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	1	55
X9	TPT pemuda	0	28	13,46	

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan terhadap setiap indikator yang berperan sebagai faktor pendukung dalam Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa nilai domain ini mencapai angka **55** pada tahun 2024.



Gambar 4.12 Capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Capaian nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2022–2024. Pada awal periode, yaitu tahun 2022 dan 2023, nilai domain ini berada dalam posisi stagnan sebesar 45. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut mengalami kenaikan signifikan, mencapai 55. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan dalam berbagai aspek yang mendukung penyediaan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya pemuda, di provinsi ini.

Stagnasi yang terjadi pada dua tahun pertama dapat disebabkan oleh berbagai tantangan, seperti keterbatasan investasi, minimnya inovasi di sektor kewirausahaan, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan tenaga kerja muda. Kendati demikian, kenaikan yang terjadi pada tahun 2024 menjadi indikator positif bahwa upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi



hambatan tersebut mulai membuahkan hasil. Program-program pelatihan kerja, peningkatan akses terhadap pembiayaan usaha, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif kemungkinan menjadi faktor pendorong utama dalam mencapai kemajuan ini.

Lonjakan nilai domain pada tahun 2024 tidak hanya mencerminkan peningkatan kuantitas peluang kerja tetapi juga kualitasnya. Keberhasilan ini bisa jadi berkaitan dengan pertumbuhan wirausaha kerah putih di kalangan pemuda serta berbagai inisiatif untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda. Dengan memberikan fokus pada sektor strategis seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif, Provinsi Jawa Tengah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, penting untuk menjaga momentum positif ini melalui kebijakan yang lebih terarah dan inovatif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu terus diperkuat untuk mengatasi tantangan struktural yang masih ada. Dengan demikian, Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mampu meningkatkan nilai domain lapangan dan kesempatan kerja secara konsisten tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakatnya. Peningkatan ini diharapkan dapat menjadi model keberhasilan bagi daerah lain dalam menciptakan peluang kerja yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

4.4 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

Partisipasi dan kepemimpinan pemuda mencerminkan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, organisasi, dan komunitas. Hal ini mencakup peran mereka dalam memimpin, memengaruhi, serta berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Domain ini meliputi aktivitas pemuda dalam kegiatan masyarakat, keterlibatan dalam organisasi kepemudaan, serta partisipasi dalam forum diskusi atau rapat. Dengan aktifnya pemuda dalam ruang-ruang tersebut, mereka tidak hanya membantu memperkuat solidaritas dan dinamika komunitas



tetapi juga mengembangkan kemampuan pribadi, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial dan kepemimpinan memiliki dampak yang luas, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi ini membantu membentuk karakter, memperluas wawasan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial pemuda. Sementara itu, kontribusi mereka dalam organisasi atau forum diskusi dapat menjadi wadah untuk menyuarakan ide-ide kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Untuk mengukur peran mereka secara konkret, digunakan tiga indikator utama: jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan sosial, keaktifan mereka dalam organisasi kepemudaan, serta kontribusi mereka dalam menyampaikan saran atau pendapat dalam pertemuan resmi. Melalui indikator-indikator ini, partisipasi dan kepemimpinan pemuda dapat dievaluasi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Partisipasi dan Kepemimpinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

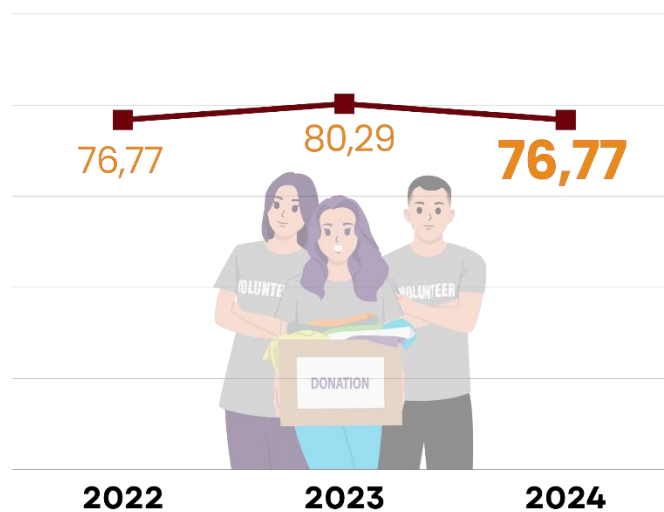
4.4.1 Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi mereka dalam pembangunan komunitas. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial mencakup beragam aktivitas, seperti gotong royong, bakti sosial, kampanye lingkungan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Partisipasi ini menunjukkan sejauh mana pemuda memiliki kesadaran terhadap isu-isu sosial di sekitarnya serta keinginan untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar pula peran pemuda sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.

Selain mencerminkan kepedulian sosial, partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan juga berkontribusi pada pengembangan diri mereka. Melalui aktivitas-aktivitas ini, pemuda mendapatkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat,

membangun jejaring sosial, serta mengasah keterampilan kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi. Oleh karena itu, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan program pembangunan, tetapi juga menjadi indikator keberlanjutan peran pemuda sebagai pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berdaya.

Berikut adalah data capaian nilai Indikator Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



Gambar 4.13 Capaian Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Capaian Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan sosial tercatat sebesar 76,77%. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2023, mencapai 80,29%, yang mencerminkan adanya peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun ke level semula, yaitu 76,77%, menunjukkan adanya penurunan minat atau keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial di provinsi ini.

Fluktuasi dalam angka capaian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kenaikan pada tahun 2023 mungkin dipengaruhi oleh adanya



program-program baru yang mendorong partisipasi pemuda, seperti kampanye sosial atau inisiatif komunitas yang lebih menarik bagi generasi muda. Sementara itu, penurunan pada tahun 2024 dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan prioritas pemuda yang lebih memilih kegiatan lain, kurangnya akses atau informasi terkait peluang untuk berpartisipasi, atau bahkan dampak dari kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial.

Penting untuk mencermati fluktuasi ini dan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Upaya untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan harus berfokus pada menciptakan program yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi mereka untuk berkontribusi dalam perubahan sosial. Selain itu, pemerintah dan organisasi kepemudaan perlu bekerja sama dalam mengembangkan strategi yang dapat mengatasi penurunan partisipasi ini, seperti memperluas akses, memfasilitasi pelatihan kepemimpinan, dan memperkenalkan lebih banyak inisiatif yang dapat menginspirasi pemuda untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial di masa depan.

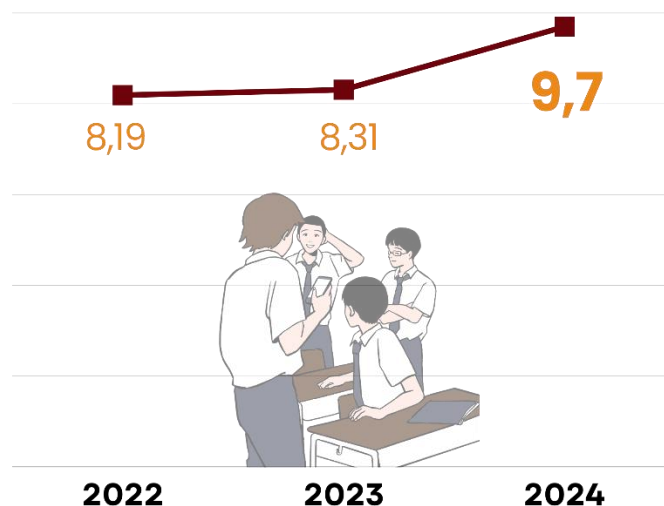
4.4.2 Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi

Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk kegiatan sosial dan kepemimpinan. Keterlibatan pemuda dalam organisasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerja sama tim, dan kemampuan manajerial. Aktivitas dalam organisasi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial serta memberi pemuda kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Keaktifan ini mencerminkan kematangan pemuda dalam menghadapi tantangan sosial dan berperan sebagai agen perubahan.

Organisasi pemuda dapat berupa wadah-wadah formal, seperti organisasi kepemudaan, lembaga sosial, atau bahkan kelompok-kelompok

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Melalui keikutsertaan dalam organisasi, pemuda memperoleh pengalaman berharga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari komunikasi hingga pengelolaan proyek. Dengan meningkatnya persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, tidak hanya individu tersebut yang berkembang, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi ini membantu memperkuat jaringan sosial dan menciptakan pemuda yang lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus memperkuat peran mereka dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut merupakan capaian indikator Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 – 2024.



Gambar 4.14 Capaian Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Capaian Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, angka capaian tercatat sebesar 8,19%, yang kemudian mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi 8,31%. Peningkatan yang terus berlanjut ini mencerminkan adanya kesadaran yang semakin tinggi di kalangan pemuda untuk terlibat dalam kegiatan organisasi yang dapat mengembangkan potensi diri mereka. Pada



tahun 2024, persentase ini meningkat lebih signifikan menjadi 9,7%, menandakan pertumbuhan yang positif dalam partisipasi pemuda di berbagai organisasi.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam pola keterlibatan pemuda di Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan ini antara lain, semakin banyaknya kesempatan dan platform bagi pemuda untuk bergabung dengan organisasi, baik yang bersifat sosial, budaya, atau kewirausahaan. Selain itu, program-program yang melibatkan pemuda dalam kegiatan kepemimpinan dan pengembangan kapasitas juga mungkin berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan minat mereka terhadap kegiatan organisasi. Pemuda yang aktif dalam organisasi tidak hanya mengembangkan keterampilan kepemimpinan tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi di komunitas mereka.

Ke depan, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan organisasi pemuda, baik dalam hal penyediaan ruang, pelatihan, maupun akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka berkembang. Peningkatan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi ini dapat menjadi indikator keberhasilan dalam membangun karakter pemuda yang berdaya dan berkompeten. Dengan terus mendorong pemuda untuk aktif dalam organisasi, mereka tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan di masyarakat.

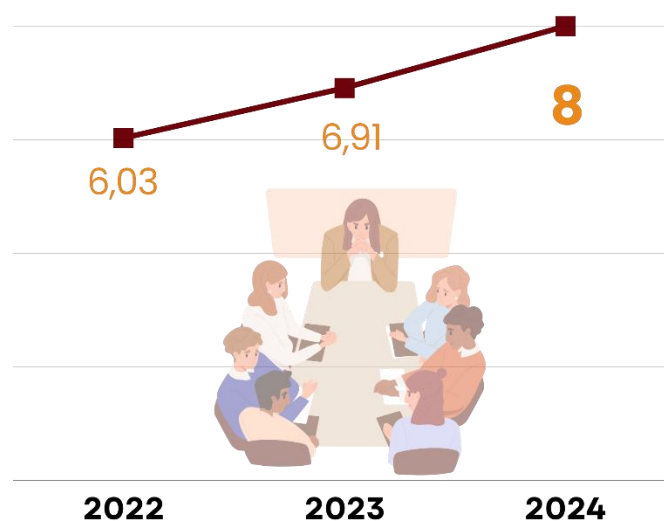
4.4.3 Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat

Persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan pemuda dalam rapat atau forum diskusi menunjukkan kematangan mereka dalam berpikir kritis dan kemampuan untuk menyampaikan ide-ide yang konstruktif. Hal ini juga mencerminkan kesiapan mereka untuk berkontribusi

dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, atau kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara luas. Dengan memberikan saran atau pendapat, pemuda tidak hanya terlibat dalam dialog tetapi juga dapat mempengaruhi arah kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang.

Partisipasi pemuda dalam rapat atau diskusi ini juga membantu mengembangkan keterampilan komunikasi, diplomasi, dan negosiasi. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang jelas dan persuasif adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Selain itu, keterlibatan dalam forum ini memberikan mereka wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana suatu keputusan diambil dan bagaimana pemuda dapat berperan dalam perubahan sosial yang lebih besar. Peningkatan persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat mencerminkan semakin banyaknya ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan memperkuat peran serta kontribusi mereka dalam pembangunan komunitas dan bangsa.

Berikut merupakan nilai capaian indikator Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 – 2024.



Gambar 4.15 Capaian Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Rapat Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024



Persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, angka capaian indikator ini tercatat sebesar 6,03%, yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 6,91%. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif pemuda dalam forum-forum diskusi atau rapat yang berfungsi sebagai ruang untuk menyampaikan ide-ide dan pendapat mereka. Selain itu, pada tahun 2024, angka ini terus naik dan mencapai 8%, yang menunjukkan keterlibatan pemuda yang semakin signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemuda di Provinsi Jawa Tengah semakin diberdayakan untuk berperan dalam berbagai forum yang melibatkan diskusi atau pembahasan kebijakan. Partisipasi mereka dalam memberikan saran atau pendapat dalam rapat merupakan bentuk konkret dari keterlibatan mereka dalam pembangunan sosial dan pemerintahan. Hal ini juga mencerminkan bahwa pemuda tidak hanya terlibat secara pasif, tetapi aktif berkontribusi dengan memberikan masukan yang dapat memperbaiki atau mengarahkan kebijakan yang sedang dibahas. Adanya ruang yang lebih besar bagi pemuda untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Kenaikan persentase ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak pemuda yang memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum dan menyampaikan ide-ide mereka secara efektif. Keberhasilan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan program pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan komunikasi, dan adanya kebijakan yang mendukung partisipasi aktif pemuda dalam pertemuan atau rapat. Dengan terus mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam diskusi, baik di tingkat lokal maupun regional, diharapkan mereka dapat terus mengasah kemampuan berpikir kritis dan memperkuat posisi mereka sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan daerah dan negara.

4.4.4 Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Nilai domain partisipasi dan kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan pada masing – masing indikator pengungkitnya. Hasil ini nantinya akan menggambarkan kondisi aspek keterlibatan pemuda di dalam kegiatan bermasyarakat dan juga aspek keaktifan dan *leadership* didalam sebuah organisasi maupun forum.

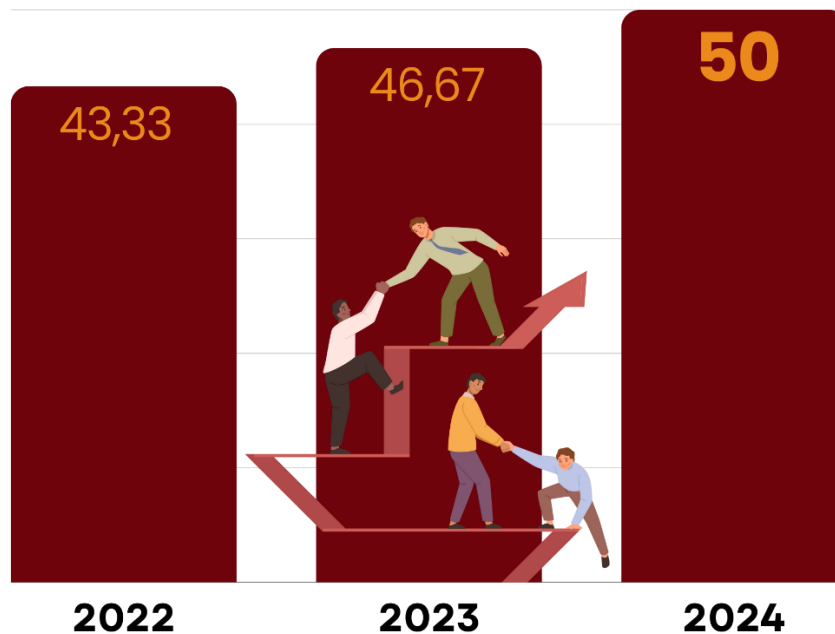
Berikut merupakan nilai capaian domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	76,77	50
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	9,7	
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	8	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan nilai domain yang didasarkan pada angka capaian masing – masing indikator pengungkit, didapatkan hasil bahwa nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 adalah sebesar **50**.



Gambar 4.16 Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022, nilai capaian domain ini tercatat sebesar 43,33%, yang menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan yang masih dalam tahap penguatan. Namun, pada tahun 2023, capaian ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 46,67%, yang menandakan adanya perbaikan dalam hal partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan yang mengarah pada pengembangan kapasitas kepemimpinan mereka.

Peningkatan yang terus berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian yang mencapai angka 50%, menandakan bahwa program-program dan kebijakan yang dirancang untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial dan kepemimpinan telah menunjukkan hasil yang positif. Adanya kebijakan yang mendorong pemuda untuk lebih aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, kegiatan sosial, dan posisi kepemimpinan terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi mereka. Ini juga mencerminkan pemahaman yang semakin berkembang di kalangan pemuda mengenai pentingnya peran mereka dalam pembangunan sosial dan pemerintahan.



Kenaikan capaian dalam domain ini dapat dilihat sebagai bukti meningkatnya kesadaran pemuda akan pentingnya kontribusi mereka terhadap masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun politik. Partisipasi dalam kegiatan kepemimpinan dan pengambilan keputusan memungkinkan pemuda untuk mengasah keterampilan organisasi, komunikasi, serta kemampuan untuk memimpin dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Seiring dengan meningkatnya capaian ini, pemuda semakin berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

Ke depan, perlu ada upaya yang lebih besar lagi untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan pemuda, terutama dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam berbagai level keputusan dan aktivitas sosial. Melalui penguatan kapasitas kepemimpinan dan pemberian ruang yang lebih luas dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik, pemuda di Provinsi Jawa Tengah dapat terus memainkan peran penting sebagai agen perubahan. Peningkatan capaian ini juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki pemuda untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan berdaya.

4.5 DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah proses yang holistik, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Upaya ini memerlukan pendekatan yang mengutamakan akses yang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Keterlibatan aktif perempuan dalam bidang-bidang tersebut tidak hanya berkontribusi pada tercapainya kesetaraan gender, tetapi juga berperan dalam menciptakan pembangunan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya memperkuat tatanan masyarakat secara keseluruhan.



Keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang memberikan gambaran jelas mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu indikator penting dalam mengukur pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang mencakup berbagai aspek penting, seperti tingkat pernikahan usia dini, angka partisipasi perempuan muda dalam pendidikan menengah dan tinggi, serta keterlibatan perempuan muda dalam sektor formal. Fokus utama dalam pengurangan pernikahan usia dini sangat penting, karena selain melindungi hak-hak dasar anak perempuan, ini juga membuka peluang bagi mereka untuk mengakses pendidikan dan membangun potensi mereka secara maksimal.

Pendidikan menjadi faktor kunci dalam pemberdayaan perempuan, karena memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkompetisi dalam dunia kerja serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan yang setara, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang lebih merata. Lebih lanjut, partisipasi perempuan dalam sektor formal, baik dalam pekerjaan maupun dalam organisasi sosial dan politik, memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberdayaan perempuan serta mengurangi hambatan sosial dan budaya yang ada, merupakan langkah-langkah krusial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak. Dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan, kita dapat mempercepat tercapainya tujuan



pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

Berikut merupakan hasil perhitungan pada masing – masing indikator penyusun Domain Gender dan Diskriminasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 – 2023.

4.5.1 Angka Perkawinan Usia Anak

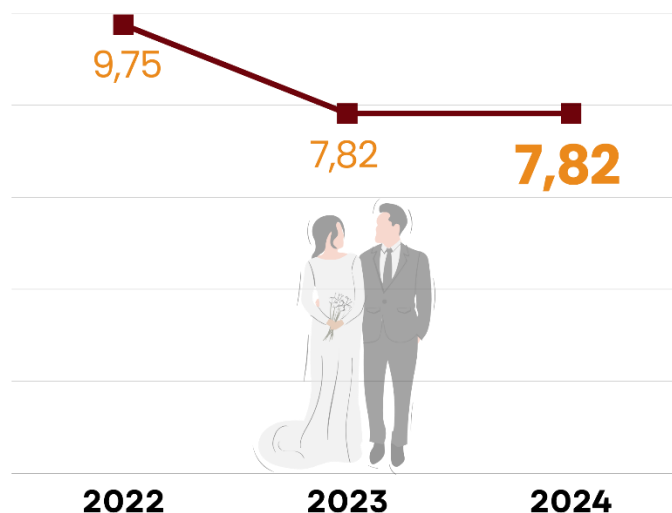
Masalah strategis nasional yang berhubungan dengan gender dan diskriminasi semakin menyoroti praktik pernikahan usia dini, yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan anak-anak, terutama dalam kasus stunting pada balita. Terdapat hubungan yang jelas antara tingginya angka pernikahan anak, khususnya di kalangan perempuan muda berusia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan prevalensi stunting pada anak-anak. Daerah dengan tingkat pernikahan anak yang lebih tinggi cenderung menunjukkan angka stunting yang lebih tinggi pula. Hal ini dapat dijelaskan oleh risiko kesehatan yang dihadapi oleh perempuan yang hamil pada usia muda, di mana mereka lebih rentan melahirkan bayi dengan masalah gizi atau bahkan kelahiran prematur. Selain itu, perempuan muda berusia 15 hingga 24 tahun sering kali lebih berisiko terhadap anemia dan kekurangan energi kronis (KEK), yang memengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan anak.

Perbedaan dalam angka pernikahan usia dini di berbagai daerah di Indonesia juga dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pendidikan antarprovinsi. Rata-rata lama sekolah di suatu provinsi memiliki korelasi negatif dengan angka pernikahan anak, yang berarti provinsi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka pernikahan anak yang lebih rendah. Remaja dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki pengetahuan yang lebih baik dan lebih lama menyelesaikan pendidikan mereka, sehingga mereka lebih cenderung menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Sebaliknya, remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung menikah pada usia yang lebih muda. Peningkatan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah dapat menjadi kunci untuk mengurangi angka pernikahan anak.

Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik, kita dapat membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan hidup yang lebih baik, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan pada akhirnya mencegah pernikahan usia dini.

Meningkatkan capaian pendidikan tidak hanya akan mengurangi angka pernikahan dini, tetapi juga berpotensi mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan serta masalah gizi pada bayi. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang bagi perempuan untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan diri mereka sendiri serta anak-anak mereka. Dengan memutus siklus pernikahan dini, kita juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting. Oleh karena itu, perhatian serius terhadap peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi perempuan di berbagai provinsi sangat penting untuk mencegah pernikahan usia dini, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting yang menjadi tantangan besar di Indonesia.

Berikut merupakan gambaran capaian Indikator Angka Perkawinan Usia Anak di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024.



Gambar 4.17 Capaian Angka Perkawinan Usia Anak Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Angka perkawinan usia anak di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan penurunan yang signifikan antara tahun 2022 hingga 2024, yang mencerminkan perubahan positif dalam upaya mengurangi pernikahan



anak. Pada tahun 2022, angka pernikahan anak di provinsi ini tercatat sebesar 9,75 persen, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup berarti menjadi 7,82 persen. Penurunan ini menandakan adanya kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap mencerminkan perlunya perhatian lebih lanjut untuk mencapai pengurangan yang lebih besar lagi.

Di tahun 2024, meskipun angka pernikahan usia anak tetap bertahan di angka 7,82 persen, hal ini menunjukkan adanya stagnasi yang perlu diatasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang lebih intensif untuk mengurangi pernikahan anak, tantangan sosial, budaya, dan ekonomi masih cukup kuat untuk memengaruhi keputusan pernikahan pada usia muda. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun perkembangan pribadi, serta memberikan dukungan lebih besar terhadap kebijakan yang mendukung hak-hak anak dan perempuan.

Penurunan angka perkawinan usia anak ini menjadi indikator positif dari adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat, terutama dalam hal kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi perempuan. Meski demikian, pencapaian yang stagnan pada tahun 2024 mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk mengurangi pernikahan dini masih membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat dalam memberikan informasi dan program-program pencegahan sangat penting untuk memastikan bahwa angka perkawinan usia anak bisa terus menurun, menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan adil bagi anak-anak perempuan di Provinsi Jawa Tengah.

4.5.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi

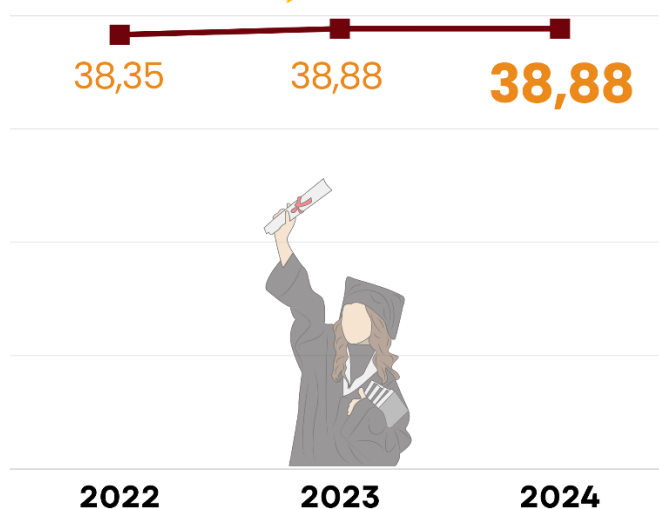
Persentase pemuda perempuan yang sedang melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi menjadi indikator yang sangat penting dalam proses



pembangunan pemuda di suatu negara. Angka ini mencerminkan sejauh mana pemuda perempuan memiliki akses terhadap pendidikan lanjutan, yang tidak hanya memberikan peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan potensi mereka untuk berkontribusi lebih besar di berbagai sektor. Pendidikan tinggi menjadi kunci dalam mempersiapkan pemuda perempuan untuk menghadapi tantangan masa depan, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan intelektual, teknis, dan sosial yang dibutuhkan di dunia yang semakin berkembang.

Semakin banyak pemuda perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, semakin besar pula potensi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, ilmiah, dan sosial. Akses pendidikan yang lebih luas akan memfasilitasi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengurangi ketimpangan gender dalam dunia kerja, dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun politik. Dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, pemuda perempuan juga lebih mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, menjadikan mereka agen perubahan yang dapat memajukan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup.

Berikut merupakan gambaran capaian indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4.18 Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Capaian persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2022, angka capaian indikator ini tercatat sebesar 38,35 persen, yang mencerminkan tingkat partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan lanjutan di provinsi tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan akses dan kesadaran tentang pentingnya melanjutkan pendidikan, terutama di kalangan pemuda perempuan.

Pada tahun 2023, angka capaian ini mengalami kenaikan sedikit menjadi 38,88 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan meskipun perubahan yang terjadi tidak terlalu besar. Kenaikan yang moderat ini mungkin menunjukkan adanya langkah-langkah yang lebih baik dalam mendukung akses pendidikan bagi pemuda perempuan, seperti kebijakan yang lebih inklusif atau program-program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Walaupun demikian, kenaikan yang masih terbatas mengindikasikan bahwa tantangan dalam mengakses pendidikan tinggi bagi pemuda perempuan masih perlu diatasi secara lebih intensif.

Namun, pada tahun 2024, capaian persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi stagnan pada



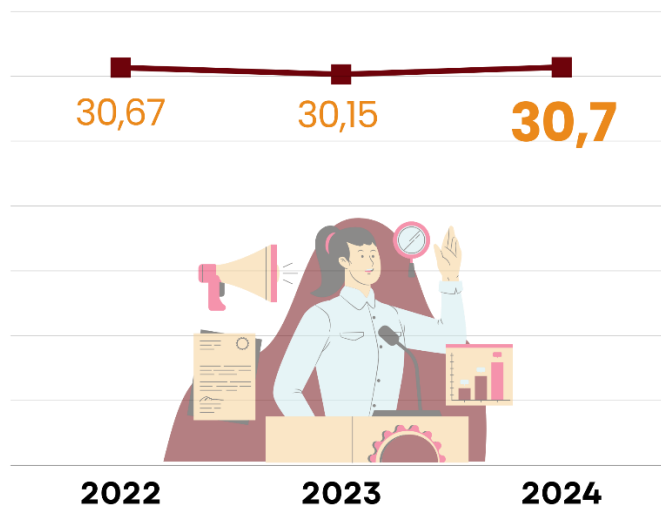
angka 38,88 persen, yang berarti tidak ada perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada peningkatan kecil di tahun-tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan bahwa tantangan untuk memperluas akses pendidikan bagi pemuda perempuan di Provinsi Jawa Tengah masih cukup besar. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta hambatan budaya atau ekonomi yang masih ada, mungkin menjadi penyebab stagnasi ini. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi pemuda perempuan dalam pendidikan, termasuk dengan menyediakan beasiswa, pelatihan keterampilan, dan akses lebih mudah ke fasilitas pendidikan tinggi.

4.5.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan berbasis gender bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, melindungi mereka dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi yang mungkin terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain aspek perlindungan, pendekatan ini juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak-anak, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan dan akses yang setara, perempuan dan anak-anak dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Dalam dunia kerja, peran perempuan semakin terlihat dengan partisipasi mereka yang aktif di berbagai sektor, baik di lembaga pemerintah maupun swasta. Keterlibatan ini merupakan pencapaian penting dalam mendorong kesetaraan gender dan berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai kontribusi perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong inovasi dan memperkaya proses pengambilan keputusan dengan keberagaman perspektif.

Berikut merupakan capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal di Provinsi Jawa Tengah pada kurun 2022 – 2024.



Gambar 4.19 Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2024
Sumber: Tim Penyusun, 2024

Angka capaian pada indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang dapat mencerminkan tantangan dan dinamika pasar kerja. Pada tahun 2022, capaian indikator ini tercatat sebesar 30,67 persen, yang menandakan tingkat partisipasi pemuda perempuan dalam sektor formal. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam hal keterlibatan perempuan muda di dunia kerja, masih ada tantangan besar dalam memastikan kesempatan yang setara di sektor formal.

Pada tahun 2023, angka capaian ini mengalami penurunan sedikit menjadi 30,15 persen, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang kurang stabil, ketatnya persaingan di pasar kerja, atau faktor-faktor struktural lainnya yang membatasi kesempatan perempuan muda untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Meskipun demikian, penurunan ini juga dapat mencerminkan adanya perubahan dalam preferensi atau kebutuhan perempuan muda terhadap jenis pekerjaan yang lebih fleksibel atau berorientasi pada sektor informal.

Namun, pada tahun 2024, capaian angka ini kembali meningkat menjadi 30,7 persen, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda perempuan di sektor formal mulai menunjukkan hasil positif. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan beberapa kebijakan atau program yang mendukung perempuan muda dalam mengakses peluang pekerjaan yang lebih baik, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan yang lebih inklusif, dan kebijakan pemberdayaan ekonomi. Meskipun fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian, tren positif pada tahun 2024 memberikan harapan bahwa dengan dukungan yang berkelanjutan, pemuda perempuan dapat semakin banyak terlibat dalam sektor formal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

4.5.4 Capaian Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Perhitungan capaian pada domain gender dan diskriminasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 ditentukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga indikator utama yang mendasarinya, yaitu:

1. Angka Perkawinan Usia Anak
2. Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi
3. Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal

Nilai dari ketiga indikator tersebut kemudian dijumlahkan dan diakumulasi, yang pada akhirnya menghasilkan nilai untuk domain kelima dalam penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah.

Adapun berikut merupakan hasil perhitungan capaian domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024.

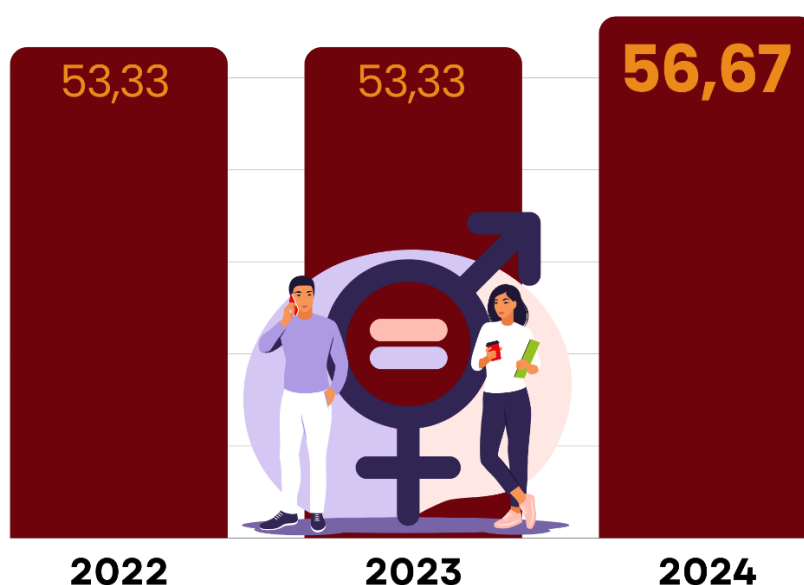
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X10	Angka perkawinan usia anak	0	45	7,82	56,67
X11	Persentase pemuda	0	100	38,88	

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
	perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi				
X12	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	30,7	

Sumber: Data Diolah, 2024

Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024 adalah sebesar **56,67**. Nilai ini didapatkan berdasarkan pada hasil perhitungan masing – masing indikator pengungkit dari domain ini.



Gambar 4.20 Capaian Domain Gender dan Diskriminasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Selama tiga tahun terakhir, dari 2022 hingga 2024, nilai capaian Domain Gender dan Diskriminasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan, meskipun tidak secara konsisten setiap tahun. Pada tahun 2022, nilai domain ini tercatat sebesar 53,33, yang mencerminkan hasil upaya awal dalam mengatasi masalah gender dan diskriminasi di wilayah tersebut. Capaian ini menunjukkan adanya langkah-langkah awal yang



cukup baik dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak dari berbagai bentuk diskriminasi.

Pada tahun 2023, nilai domain ini tetap stagnan di angka 53,33. Ketidakberubahan ini mungkin mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan dalam implementasi kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi. Meski demikian, stagnansi ini juga dapat mencerminkan upaya mempertahankan hasil capaian dari tahun sebelumnya, di tengah berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaannya.

Namun, pada tahun 2024, nilai domain ini mengalami peningkatan signifikan, naik menjadi 56,67. Peningkatan ini menandakan keberhasilan beberapa program strategis yang mulai menunjukkan hasil nyata. Misalnya, upaya pengurangan angka perkawinan anak, peningkatan akses perempuan muda terhadap pendidikan menengah dan tinggi, serta peningkatan partisipasi perempuan muda di sektor formal. Keberhasilan ini memberikan optimisme bahwa langkah-langkah pemberdayaan berbasis gender dapat terus diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, kenaikan nilai capaian Domain Gender dan Diskriminasi di Provinsi Jawa Tengah ini mencerminkan kemajuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, tren positif ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan telah berada pada jalur yang tepat. Keberlanjutan dan perluasan program-program ini diharapkan dapat membawa dampak yang lebih besar terhadap pembangunan yang inklusif dan adil di wilayah tersebut.

4.6 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Setelah melakukan perhitungan pada masing – masing domain penyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, maka langkah perhitungan selanjutnya adalah menghitung capaian nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Berikut merupakan rincian perhitungan IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 4.6 Perhitungan Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

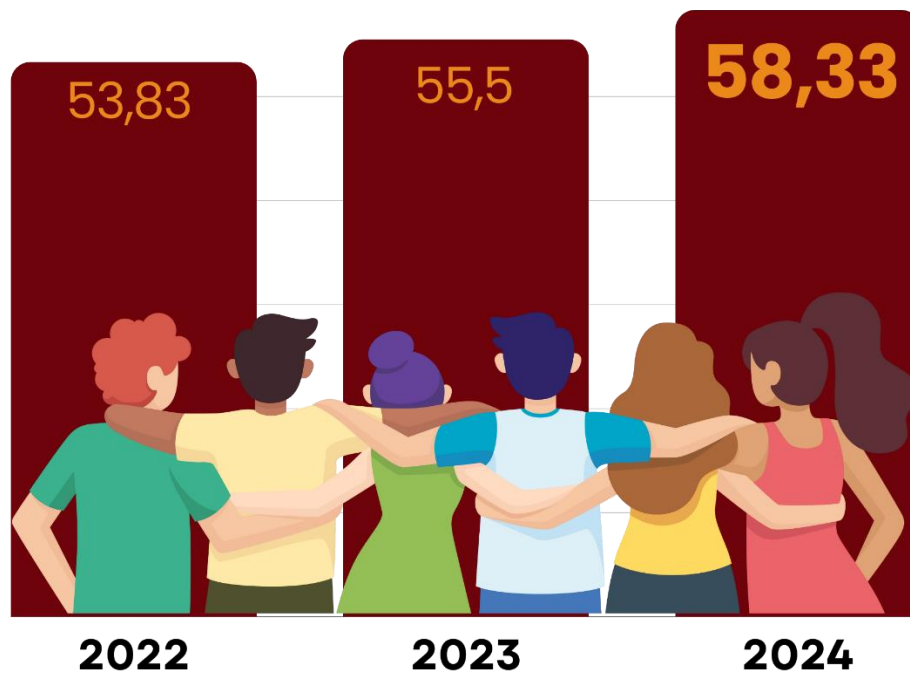
No	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Transformasi	Nilai Domain
Domain Pendidikan						
1	Rata-rata lama sekolah	0	15	11,42	8	
2	APK sekolah menengah	0	100	90,25	10	
3	APK perguruan tinggi	0	100	24,78	3	
Nilai Domain 1						70
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan						
4	Angka kesakitan pemuda	0	20	7	7	
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,53	9	
6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	28,96	2	
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	20	6	
Nilai Domain 2						60
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja						
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	1	5	
9	TPT pemuda	0	28	13,46	6	
Nilai Domain 3						55
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan						
10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	76,77	8	
11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	9,7	3	
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	8	4	
Nilai Domain 4						50
Domain Gender dan Diskriminasi						
13	Angka perkawinan usia anak	0	45	7,82	9	
14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100	38,88	2	
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	30,7	6	
Nilai Domain 5						56,67
Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah 2024						58,33

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 58,33. Pencapaian ini merupakan hasil akumulasi dari masing-masing domain penyusun IPP, dengan kontribusi terbesar berasal dari Domain Pendidikan yang mencatat nilai tertinggi, yaitu sebesar 70. Hal ini menegaskan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas

pendidikan bagi perempuan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keseluruhan nilai IPP.

Kenaikan nilai IPP ini mencerminkan kemajuan positif yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPP tercatat sebesar 53,83, kemudian meningkat menjadi 55,5 pada tahun 2023. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian tertinggi sebesar 58,33.



Gambar 4.21 Nilai IPP Provinsi Jawa Tengah

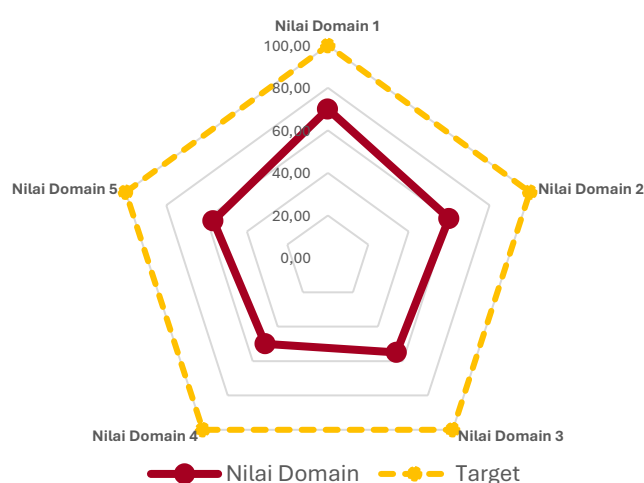
Sumber: Data Diolah, 2024

Peningkatan nilai IPP Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir mencerminkan kemajuan positif yang berhasil dicapai dalam pembangunan kepemudaan. Capaian ini menjadi indikator penting keberhasilan berbagai program dan kebijakan, khususnya dalam aspek pemberdayaan pemuda. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, tetapi juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemuda untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara aktif dalam berbagai sektor kehidupan.

Secara keseluruhan, tren positif dalam nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukkan bahwa berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan

akses pendidikan, kualitas kesehatan, dan partisipasi sosial mulai membuahkan hasil. Generasi muda di Jawa Tengah kini memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat inovasi, dan menjadi individu yang kompetitif di tingkat nasional maupun global. Dengan dukungan yang berkelanjutan, mereka diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan daerah dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Namun, meskipun capaian IPP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang membanggakan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa domain memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas capaian secara keseluruhan. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi harus terus dilakukan untuk memperkuat indikator-indikator yang belum optimal. Gambaran kontribusi dari masing-masing domain terhadap capaian IPP Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 memberikan panduan untuk menentukan langkah prioritas dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di masa depan.



Gambar 4.22 Distribusi Capaian Perdomain IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan grafik distribusi capaian domain IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di atas, didapatkan informasi bahwa domain yang memiliki capaian terendah dan perlu adanya upaya peningkatan dan penguatan adalah **Domain Partisipasi dan Kepemimpinan**.

Sebagai langkah awal, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan lebih banyak ruang yang mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan



sosial, politik, dan ekonomi. Program-program pemberdayaan yang fokus pada pengembangan kapasitas individu menjadi salah satu solusi strategis. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, lokakarya, dan pengembangan komunitas pemuda memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengasah keterampilan, memahami isu-isu strategis, dan mengambil peran dalam memecahkan masalah di komunitas mereka. Dengan menyediakan platform yang inklusif, pemuda dapat didorong untuk berperan sebagai penggerak utama perubahan sosial.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin inisiatif ini. Langkah konkret yang dapat diambil adalah memperkuat kolaborasi dengan organisasi kepemudaan seperti KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan organisasi kepemudaan lainnya di wilayah provinsi. Sinergi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan memastikan pemuda dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memperkuat kontribusi pemuda terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.7 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Jika dilihat capaian IPP di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kabupaten/kota, sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 hanya terdapat 4 kabupaten/kota yang menghitung capaian IPP di wilayahnya masing-masing yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung dan Kota Semarang. Kabupaten Sukoharjo telah menggunakan indikator IPP sejak tahun 2021 (awal periode RPJMD 2021-2026) sehingga menjadi salah satu Kabupaten yang konsisten mengukur capaian Pembangunan pemuda melalui IPP.

Berikut merupakan daftar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan perhitungan IPP.

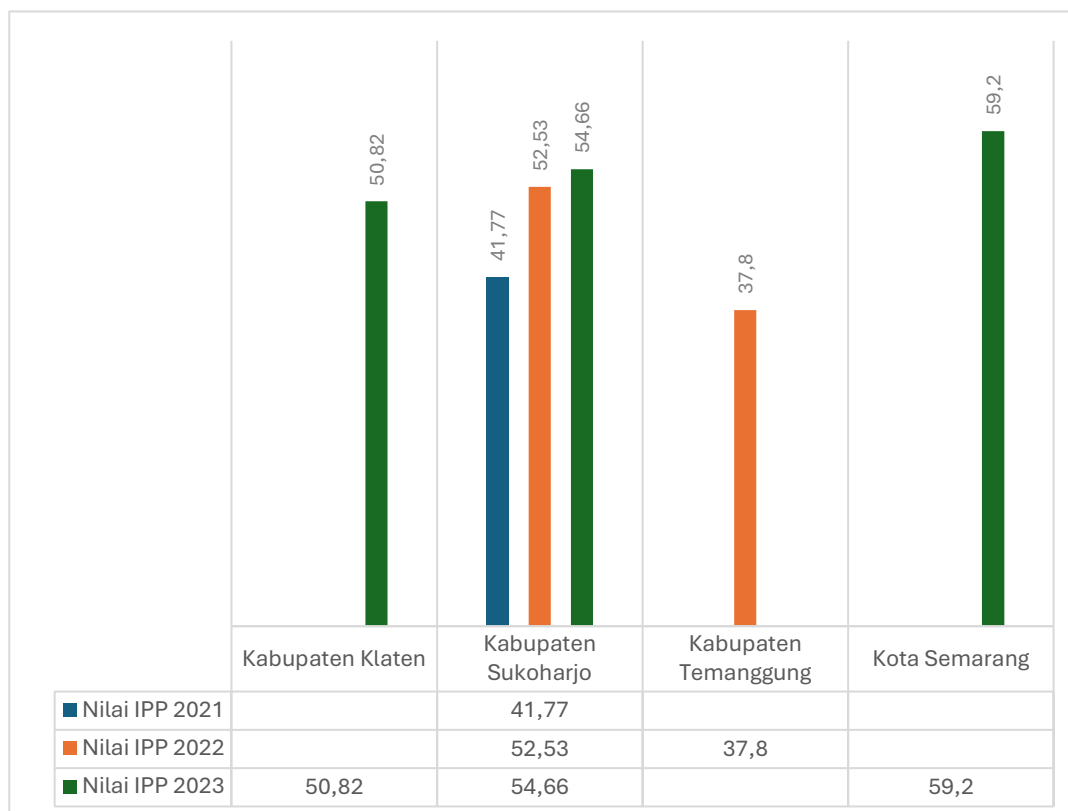
Tabel 4.7 Daftar Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang Melakukan Perhitungan IPP

Kabupaten/ Kota	Menyusun IPP sebagai Indikator			
	2020	2021	2022	2023
KABUPATEN				
Cilacap				
Banyumas				
Purbalingga				
Banjarnegara				
Kebumen				
Purworejo				
Wonosobo				
Magelang				
Boyolali				
Klaten				50,82
Sukoharjo		41,77	52,53	54,66
Wonogiri				
Karanganyar				
Sragen				
Grobogan				
Blora				
Rembang				
Pati				
Kudus				
Jepara				
Demak				
Semarang				
Temanggung			37,8	
Kendal				
Batang				
Pekalongan				
Pemalang				
Tegal				
Brebes				
KOTA				
Magelang				
Surakarta				
Salatiga				
Semarang				59,2
Pekalongan				
Tegal				

Sumber: Dokumen Profil Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah 2024

Minimnya jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) berkaitan erat dengan **belum optimalnya penggunaan IPP sebagai alat ukur kinerja daerah maupun OPD**. Hal ini terlihat bahwa IPP belum digunakan sebagai indikator kinerja utama, kinerja kunci, maupun kinerja sasaran dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Sehingga potensi manfaatnya sebagai tolok ukur pembangunan pemuda tidak terealisasi secara maksimal.

Sebaliknya, kabupaten/kota yang telah menyusun IPP menunjukkan upaya lebih baik dalam pengelolaan pembangunan pemuda di wilayahnya. IPP digunakan sebagai indikator kinerja untuk mengevaluasi capaian dan menetapkan prioritas kebijakan. Dengan adanya perbedaan ini, perlu upaya untuk mendorong lebih banyak kabupaten/kota agar menyusun dan memanfaatkan IPP secara optimal. Pendekatan ini dapat mencakup peningkatan pemahaman tentang pentingnya IPP, pendampingan teknis, serta integrasi IPP dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah grafik kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah berhasil menghitung dan menyusun IPP sebagai bagian dari upaya pengelolaan urusan kepemudaan yang lebih terarah.



Gambar 4.23 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Masing-Masing Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun

Sumber: Dokumen Profil Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah 2024



Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

BAB 5

PENUTUP

**NASKAH
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
PROVINSI JAWA TENGAH 2024**

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil telaah terhadap perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 58,33.
2. Kenaikan nilai IPP ini mencerminkan kemajuan positif yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPP tercatat sebesar 53,83, kemudian meningkat menjadi 55,5 pada tahun 2023. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian tertinggi sebesar 58,33.
3. Ditinjau berdasarkan kontribusi masing-masing domain pembentuk IPP, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Domain Pendidikan memberikan kontribusi terbesar dengan nilai domain 70, dimana nilai masing-masing indikator pembentuk domain pendidikan:
 - X1 Rata-rata lama sekolah: 11,42/15 (batas maksimum)
 - X2 APK sekolah menengah: 90,25/100 (batas maksimum)
 - X3 APK perguruan tinggi: 24,78/100 (batas maksimum)
 - b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan memberikan kontribusi dengan nilai domain 60, dimana nilai masing-masing indikator pembentuk domain:
 - X4 Angka kesakitan pemuda: 7/20 (batas maksimum)
 - X5 Persentase pemuda korban kejahatan: 0,53/3 (batas maksimum)
 - X6 Persentase pemuda yang merokok: 28,96/36 (batas maksimum)
 - X7 Persentase remaja perempuan yang sedang hamil: 20/45 (batas maksimum)

- 
- c. Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja memberikan kontribusi yang cukup rendah dengan nilai domain 55, dimana nilai masing-masing indikator pembentuk domain:
- X8 Persentase pemuda wirausaha kerah putih: 1/2 (batas maksimum)
 - X9 TPT pemuda: 13,46/28 (batas maksimum)
- d. Berikutnya, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan memberikan kontribusi yang paling rendah terhadap IPP Jawa Tengah 2024 dengan nilai domain 50, dimana nilai masing-masing indikator pembentuk domain:
- X10 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan: 76,77/100 (batas maksimum)
 - X11 Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi: 9,7/45 (batas maksimum)
 - X12 Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat: 8/25 (batas maksimum)
- e. Selanjutnya, Domain Gender dan Diskriminasi memberikan kontribusi dengan nilai domain 56,67, dimana nilai masing-masing indikator pembentuk domain:
- X13 Angka perkawinan usia anak: 7,82/45 (batas maksimum)
 - X14 Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi: 38,88/100 (batas maksimum)
 - X15 Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal: 30,7/60 (batas maksimum)
4. Saat ini terdapat 4 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah menghitung capaian IPP di wilayahnya masing-masing yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung dan Kota Semarang.

5.2 REKOMENDASI

Ditinjau dari hasil Kesimpulan di atas, maka dalam Naskah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ini dapat



dirumuskan beberapa poin rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Tengah Tahun 2024, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan menunjukkan kontribusi paling rendah dengan nilai domain sebesar 50. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi yang mengarah pada penguatan dan intensifikasi pengembangan domain ini agar peran pemuda dalam pembangunan lebih optimal. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan:

a. Penguatan Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan

- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan: Mengadakan pelatihan rutin untuk membekali pemuda dengan keterampilan kepemimpinan, seperti pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen tim.
- Program Mentorship: Menghubungkan pemuda dengan pemimpin-pemimpin berpengalaman di berbagai bidang sebagai mentor.
- Penguatan Organisasi Pemuda: Memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan untuk meningkatkan kapasitasnya, baik melalui pendanaan, pelatihan, maupun akses terhadap jaringan kolaborasi.

b. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Proses Pengambilan Keputusan

- Forum Pemuda Daerah: Membentuk forum pemuda tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk menjaring aspirasi dan masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah.
- Kuota Partisipasi Pemuda: Meningkatkan keterlibatan pemuda dalam forum-forum strategis, seperti Musrenbang, perencanaan pembangunan daerah, dan lainnya.

c. Penguatan Peran Pemuda di Tingkat Lokal

- 
- Pemberdayaan Pemuda Desa: Mengintegrasikan pemuda dalam program pembangunan desa, seperti Dana Desa, dengan memberi mereka peran dalam pengelolaan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 - Pembentukan Kelompok Pemuda Peduli: Mendorong pembentukan komunitas-komunitas pemuda yang aktif dalam isu lokal seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau mitigasi bencana.
- d. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Komunitas
- Pengembangan Program CSR untuk Pemuda: Mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan partisipasi pemuda melalui program CSR yang berbasis kepemimpinan dan pemberdayaan.
 - Kemitraan dengan LSM dan Komunitas Pemuda: Menggalang kerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki program pemberdayaan pemuda.
- e. Platform Digital Partisipasi Pemuda: Membangun platform digital yang memungkinkan pemuda menyampaikan ide, aspirasi, dan terlibat aktif dalam diskusi kebijakan.
- f. Penggunaan Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi dan melibatkan pemuda dalam isu-isu pembangunan.
2. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa persentase pemuda wirausaha kerah putih hanya sebesar 1% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 13,46%, diperlukan langkah strategis dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja bagi pemuda di Jawa Tengah. Berikut adalah rekomendasi yang dapat diterapkan:
- a. **Pelatihan Keterampilan Digital dan Teknis:** Mengadakan pelatihan intensif dalam bidang teknologi informasi, desain, pemasaran digital, dan keterampilan berbasis industri 4.0 yang memiliki peluang besar di sektor kerah putih.

- 
- b. **Program Sertifikasi Profesi:** Memberikan akses kepada pemuda untuk mengikuti sertifikasi profesi yang diakui, sehingga mereka memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja.
 - c. **Pendidikan Vokasi dan Kewirausahaan:**Memperluas jangkauan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional, termasuk program pelatihan kewirausahaan.
 - d. **Program Inkubasi Bisnis:** Mendirikan inkubator bisnis untuk mendukung pemuda dalam mengembangkan usaha berbasis inovasi dan teknologi. Inkubator ini dapat memberikan pelatihan, pendampingan, akses pendanaan, dan jaringan pasar.
 - e. **Dukungan Pendanaan untuk Start-Up:** Memberikan kemudahan akses kepada pemuda untuk memperoleh pinjaman atau hibah usaha melalui program pemerintah, BUMN, atau kerja sama dengan sektor swasta.
 - f. **Kerjasama dengan Perusahaan Teknologi:** Menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan peluang kerja berbasis proyek atau freelance yang dapat digeluti oleh pemuda.
 - g. **Peningkatan Investasi Industri Lokal:** Mendorong investasi industri yang padat karya di Jawa Tengah untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi pemuda.
 - h. **Revitalisasi Sektor UMKM:** Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemuda untuk mengelola UMKM, khususnya di sektor kreatif dan digital.
3. Selanjutnya, meskipun Domain Pendidikan dan Domain Kesehatan dan Kesejahteraan telah mampu memberikan kontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah, beberapa penguatan juga tetap diperlukan terhadap komponen pendudukan terhadap kedua domain tersebut.
- a. Pada Domain Pendidikan diperluykan paya peningkatan Rata-rata lama sekolah diman saat ini berada pada angka 11,42/15 (batas maksimum)

- 
- b. Peningkatan pada APK perguruan tinggi Dimana saat ini hanya mencapai 24,78/100% (batas maksimum)
 - c. Pada Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Persentase pemuda yang merokok: 28,96/36 (batas maksimum) Dimana angka tersebut masih cukup tinggi sehingga diperlukan program yang berkaitan dengan upaya pengurangan angka pemuda merokok.
4. Melihat rendahnya jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyusun IPP, maka pemerintah provinsi perlu melakukan fasilitasi teknis dengan membentuk tim koordinasi teknis IPP.
 5. DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah perlu mempertimbangkan mekanisme evaluasi dan pemantauan terhadap capaian IPP Kabupaten/Kota melalui optimalisasi peran dari Tim Koordinasi Lintas Sektor yang sebelumnya telah disusun dalam RAD.



DAFTAR PUSTAKA

- Banurea, R. (2017). *PERAN PEMUDA DALAM PENGEMBANGAN DAERAH PADA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI DI KABUPATEN DAIRI* Rizal. 77–84.
- Efendi, A. (2020). Studi Korelasi Indeks Pembangunan Pemuda (Ipp) Dengan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 9(1), 39–48.
- Muryadi, A. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pemuda Dan Olahraga Di Indonesia. *Proceedings of the National Seminar on Women's Gait in sports towards a healthy lifestyle, April*, 1–6.
- Napsiyah, S., Fazrha Bunga Arcadia, R., Fadillah Syafa'at, D., Putri Puspita, F., Naufal Ardiansyah, M., & Rifa Amalia, R. (2023). Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Dalam Mengembangkan Potensi Pemuda Di Kampung Krajan Desa Simpang. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 4(2), 182–196. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.18>
- Pinilas, R., Ronny Gosal, & Ventje Kasenda. (2017). Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 8.